

**PENGARUH KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN,
KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
TINGKAT KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH, DAN
KOMPETENSI PENAGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN
TERHADAP OPINI AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2020**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Akuntansi Syariah**



Oleh:

MOH FARIS NUR WAHIB

NIM 1905046097

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2022

**PENGARUH KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN,
KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
TINGKAT KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH, DAN
KOMPETENSI PENAGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN
TERHADAP OPINI AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2020**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Akuntansi Syariah**



Oleh:

MOH FARIS NUR WAHIB

NIM 1905046097

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

An. Sdr. Moh Faris Nur Wahib

Kepada, Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang,

Di Tempat,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Moh Faris Nur Wahib

NIM : 1905046097

Prodi : Akuntansi Syariah

Judul : Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Dan Kompetensi Penanggung Jawab Laporan Keuangan Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2020

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Desember 2022

Pembimbing I

Prof. Dr. Siti Mujiatun, M.Ag.

NIP. 19590413 198703 2 001

Pembimbing II

Dr. Ratno Agrivanto, M.Si., Akt.

NIP. 19800128 200801 1 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Moh Faris Nur Wahib
NIM : 1905046097
Prodi : Akuntansi Syariah
Judul : Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Dan Kompetensi Penanggung Jawab Laporan Keuangan Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2020

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude, pada tanggal :

20 Desember 2022

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah tahun akademik 2022/2023

Semarang, 20 Desember 2022

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
NIP. 19700410 199503 1 001


Prof. Dr. Siti Mujiбатun, M.Ag.
NIP. 19590413 198703 2 001

Penguji Utama I

Penguji Utama II

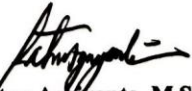

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 19730811 200003 1 004


Mayassarah, M.Si.
NIP. 19710429 201601 2 901

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Siti Mujiбатun, M.Ag.
NIP. 19590413 198703 2 001


Dr. Ratno Agrevanto, M.Si., Akt.
NIP. 19800128 200801 1 010



MOTTO

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (12)

“Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) pengawas yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (amal perbuatanmu). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹

QS. al-Infitar [82]: 20-21

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). h. 881

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Parju dan Ibunda Suryati, yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dukungan, dan doa serta segala pengorbanan dalam mendidik penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak penulis, Elok Noor Fitriana dan Khoirul Rohmah Safitri, yang telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keponakan penulis, Hafiz, Khumira, Shanum dan Hana yang selalu mendukung dan menghibur.
4. Keluarga besar penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Desember 2022
Deklarator,



Moh Faris Nur Wahib
NIM. 1905046097

TRANSLITERASI

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Ṡa	Ṡ
ج	Jim	J
ح	Ḥa	Ḥ
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Ẓal	Ẓ
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Ṣad	Ṣ
ض	Ḍad	Ḍ
ط	Ṭa	Ṭ
ظ	Ẓa	Ẓ
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	G
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K

ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

C. Diftong

أَيّ = ay

أَوّ = aw

D. Syaddah

Syaddah atau tasydīd dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

E. Kata Sandang

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al*-. misalnya الصناعة = *al-shina 'ah*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma 'isyah al-thabi 'iyyah*.

ABSTRAK

Opini audit merupakan pernyataan profesional berupa kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemerintah daerah membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan menerbitkan opini audit sebagai kesimpulan atas audit yang dilakukan. Masih banyak daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2020 yang memperoleh opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan opini selain wajar tanpa pengecualian. Perbedaan hasil mengenai pengaruh pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, dan kompetensi penanggung jawab laporan keuangan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah menjadi latar belakang penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk: muncul pertanyaan masalah sebagai berikut: (1) Mengetahui apakah kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. (2) Mengetahui apakah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. (3) Mengetahui apakah tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. (4) Mengetahui apakah kompetensi penanggung jawab laporan keuangan berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan alat analisis regresi logistik. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumentasi berupa laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian populasi yaitu seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dan diperoleh 472 kabupaten/kota di Indonesia yang dapat memenuhi data untuk dilakukan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap opini audit. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kompetensi penanggung jawab laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: Opini Audit, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

ABSTRACT

An audit opinion is a professional statement in the form of an examination conclusion regarding the level of reasonableness of the information presented in the financial statements. Local governments make financial statements as a form of accountability for state financial management. The financial statements are audited by the Audit Board which issue an audit opinion as a conclusion to the audit conducted. There are still many regencies/cities in Indonesia in 2020 that obtained audit opinions on local government financial statements with opinions other than reasonable without exceptions. Differences in results regarding the influence of weaknesses in the internal control system, non-compliance with laws and regulations, the level of dependence of local governments, and the competence of the person in charge of financial statements on the audit opinion of local government financial statements are the background of this research.

Based on this background, the author conducted a study that aimed to: the following problems arise: (1) Knowing whether the weaknesses of the internal control system have an effect on the audit opinion of local government financial statements. (2) Determine whether non-compliance with laws and regulations affects the audit opinion of local government financial statements. (3) Determine whether the level of dependence of local governments has an effect on the audit opinion of local government financial statements. (4) Determine whether the competence of the person in charge of financial statements has an effect on the audit opinion of the local government's financial statements.

This research is quantitative research with logistic regression analysis tools. The data used is secondary data in the form of documentation in the form of reports on the results of the examination of the financial statements of the regional government. This study carried out population research, namely all district/city governments in Indonesia and obtained 472 regencies/cities in Indonesia that could meet the data for research.

The results of this study show that the weakness of the internal control system negatively affects audit opinion. The level of dependence of local governments negatively affects the audit opinion of local government reports. Meanwhile, non-compliance with laws and regulations and the competence of the person in charge of financial statements do not affect the audit opinion of local government financial statements.

Keywords: *Audit Opinion, Local Government Financial Statements*

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan ke hadirat Allah yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga dapat diselesaikannya skripsi yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa pula tercurahkan ke hadirat beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini merupakan syarat akademisi dalam menyelesaikan Studi Strata 1 untuk mencapai gelar sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Melalui skripsi ini penulis banyak belajar sekaligus memperoleh pengalaman-pengalaman baru secara langsung. Dan diharapkan pengalaman tersebut dapat bermanfaat dimasa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penulisan maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Parju dan Ibunda Suryati, yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dukungan, dan doa serta segala pengorbanan dalam mendidik penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak penulis, Elok Noor Fitriana dan Khoirul Rohmah Safitri, yang telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keponakan penulis, Hafiz, Khumira, Shanum dan Hana yang selalu mendukung dan menghibur.
4. Dr.H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
5. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt, CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang atas petunjuk dan nasehatnya kepada penulis.
6. Warno, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang atas petunjuk dan nasehatnya kepada penulis.

7. Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag., selaku dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik.
8. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt, CA, selaku dosen Pembimbing II atas segala bimbingan dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti studi.
10. Sahabat dan teman seperjuangan, yang telah memberikan dorongan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman Akuntansi 2019, yang telah menemani penulis selama belajar di UIN Walisongo Semarang dan selalu mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Magang KAP Tarmizi Achamd, Magang BPKAD Kota Semarang dan KKN Posko 42, yang selalu mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Remaja Masjid Al-Ikhlash, yang selalu mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu.

Penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena hal tersebut tidak lepas dari kelemahan dan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaan pada penulis berikutnya.

Akhirnya penulis berharap agar Skripsi ini berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi peneliti sendiri.

Semarang, 5 Desember 2022

Peneliti,



Moh Faris Nur Wahib

NIM. 1905046097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARAS	vi
TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Keagenan.....	12
2.1.2 Opini Audit	13
2.1.3 Sistem Pengendalian Intern	15
2.1.4 Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	18
2.1.5 Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah	20

2.1.6	Kompetensi Penanggung Jawab Laporan Keuangan.....	21
2.2	Penelitian sebelumnya.....	23
2.3	Hipotesis.....	31
BAB III		36
3.1	Jenis dan Sumber Data	36
3.2	Populasi dan Sampel	36
3.3	Teknik Pengumpulan Data	36
3.4	Variabel dan Definisi Oprasional Data	36
3.5	Teknik Analisis Data.....	39
3.6	Model Regresi Logistik.....	41
3.7	Uji Hipotesis.....	42
BAB IV		43
4.1	Penyajian Data Penelitian.....	43
4.2	Analisis statistik deskriptif	43
4.3	Analisis Regresi Logistik	47
4.4	Model Regresi Logistik.....	50
4.5	Uji Hipotesis.....	53
4.6	Pembahasan.....	56
BAB V		60
5.1	Kesimpulan.....	60
5.2	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN		68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Sebelumnya.....	23
Tabel 2. Definisi Oprasional Variabel	38
Tabel 3. Deskripsi Frekuensi Variabel Opini Audit	43
Tabel 4. Deskripsi Statistik Variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	44
Tabel 5. Deskripsi Statistik Variabel Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang- Undangan	45
Tabel 6. Deskripsi Statistik Variabel Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah	46
Tabel 7. Deskripsi Frekuensi Variabel Kompetensi Penanggung Jawab Laporan Keuangan	46
Tabel 8. Likelihood L Awal (Block Number 0)	47
Tabel 9. Likelihood L Akhir (Block Number 1).....	48
Tabel 10. Uji Kelayakan Model Regresi.....	49
Tabel 11. Uji Koefisien Determinasi	49
Tabel 12. Klasifikasi Tabel.....	50
Tabel 13. Hasil Analisis Regresi Logistik	50
Tabel 14. Uji t	53
Tabel 15. Uji F	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 4 Tahun	2
Gambar 2. Kerangka Berfikir Penelitian	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan pemerikssan keuangan atau dikenal BPK merupakan instansi atau badan milik negara yang bertugas melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara.² BPK memiliki tiga jenis audit yaitu, audit atas keuangan, audit atas kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Setiap audit memiliki hasil yang berbeda. Audit keuangan menghasilkan opini. Audit kinerja menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Dan audit dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan sesuai dengan tujuan audit yang ditentukan. Hasil dari setiap audit BPK disusun dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan.

Mengenai opini audit dilaskan dalam Pasal 16 Ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 sebagai berikut:

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).³

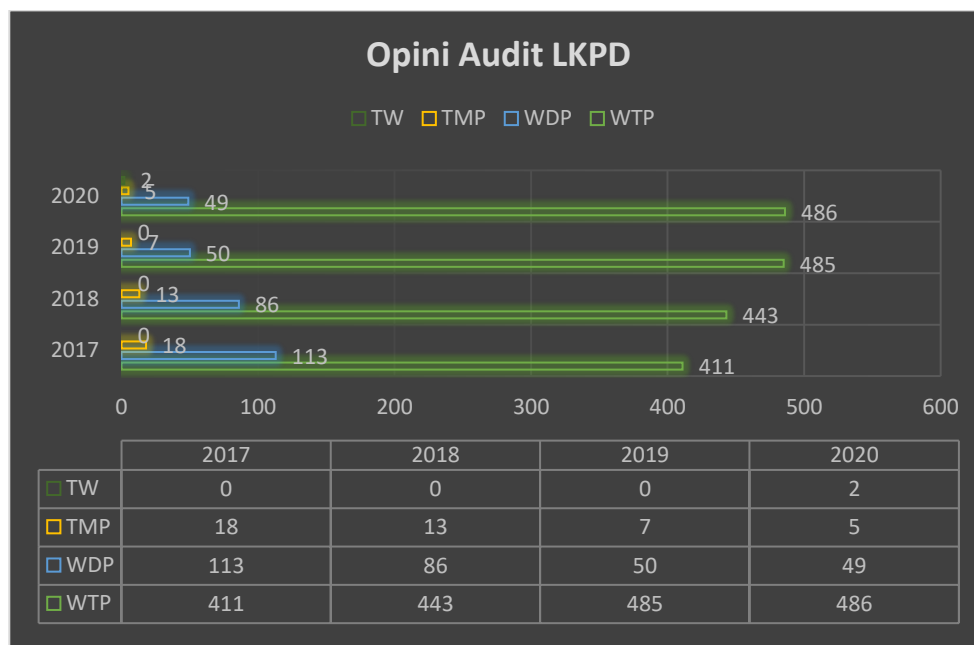
Masih banyaknya laporan keuangan daerah kabupaten/kota tahun 2020 yang meraih opini selain wajar tanpa pengecualian. Tahun 2020 menjadi tahun penelitian dikarenakan pada tahun 2020 terdapat daerah yang mendapatkan opini tidak wajar, yang mana pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada daerah kabupaten dan kota yang memperoleh opini Tidak Wajar. Kabupaten Jember dan Kabupaten Minahasa Utara merupakan kabupaten yang

² Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, Dan Pemberian Keterangan Ahli, 2020.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Indonesia, 2004).

mendapatkan opini Tidak Wajar pada audit laporan keuangan tahun 2020. Dan terdapat 5 daerah yang mendapatkan opini audit selain Wajar Tanpa Pengecualian dengan opini Tidak Menyatakan Pendapat yaitu Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Waropen pada audit LKPD.

Gambar 1. Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 4 Tahun



Sumber : Data diolah penulis, 2022

Dari data diatas menunjukkan opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2017 – 2020. Tahun 2017 mengungkapkan 411 (76%) kabupaten/kota mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 113 (21%) kabupaten/kota mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 18 (3%) kabupaten/kota mendapatkan opini pernyataan menolak memberikan opini (TMP), dan 0 (0%) kabupaten/kota mendapatkan opini Tidak Wajar (TW). Pada tahun berikutnya Tahun 2018 mengungkapkan 443 (82%) kabupaten/kota mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 86 (16%) kabupaten/kota mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 13 (2%) kabupaten/kota mendapatkan opini pernyataan menolak memberikan opini (TMP), dan 0 (0%) kabupaten/kota mendapatkan opini Tidak Wajar (TW). Pada tahun berikutnya, Tahun 2019 mengungkapkan 485 (90%) kabupaten/kota mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 50 (9%) kabupaten/kota mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 7 (1%) kabupaten/kota mendapatkan opini pernyataan menolak

memberikan opini (TMP), dan 0 (0%) kabupaten/kota mendapatkan opini Tidak Wajar (TW). Dan pada tahun 2020 mengungkapkan 486 (90%) kabupaten/kota mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 49 (9%) kabupaten/kota mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 5 (0,7%) kabupaten/kota mendapatkan opini pernyataan menolak memberikan opini (TMP) dan 2 (0,3%) kabupaten/kota mendapatkan opini Tidak Wajar (TW). Masih banyaknya laporan keuangan daerah kabupaten/kota tahun 2020 yang meraih opini selain wajar tanpa pengecualian menjadi fenomena gap pada penelitian ini.

Penelitian terdahulu telah melakukan kajian terhadap penyebab perolehan opini audit. Penelitian oleh Prasetyaningsih, Yuhalfiyah dan Susanto, 2014; Setiyawati, 2016; Widodo dan Sudarno, 2017; Kusumawati dan Ratmono, 2017; Hamidayanti dan Wardani, 2018; Oktaria dan Herliansyah, 2019; Siregar dan Rudiansyah, 2019; Surya dan Suparno, 2019; Syahputra, Hasan dan Rasuli, 2019; Hia, Erlina dan Sirojuzilam, 2020; Bandiyono, 2021 menunjukkan sistem pengendalian intern sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi opini audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyaningsih, Yuhalfiyah dan Susanto, 2014 menunjukkan kelemahan atas sistem pengendalian intern dijadikan pertimbangan mengenai opini audit oleh BPK.⁴ Penelitian Setiyawati, 2016 menunjukkan adanya pengaruh kelemahan pelaporan dan akuntansi entitas pemerintah daerah pada opini audit BPK RI.⁵ Penelitian Kusumawati dan Ratmono, 2017 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif atas opini audit pada kelemahan sistem pengendalian intern.⁶ Penelitian Widodo dan Sudarno, 2017 menunjukkan bahwa temuan kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan terhadap opini dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.⁷ Penelitian Hamidayanti dan Wardani, 2018 menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang

⁴ Erny Prasetyaningsih, Gufratul Yuhalfiyah, and Heri Susanto, "Internal Control System Weakness and Non-Compliance to the Provision of Legislation in Practicing Audit of Local Government in Indonesia," *Open Journal of Political Science* 4 (2014): 257–264.

⁵ Hari Setiyawati, "Effect of Weaknesses of the Internal Control Systems and Non-Compliance with Statutory Provisions on The Audit Opinion of The Audit Board of The Republic of Indonesia," *International Journal of Engineering Research and Application* 6, no. 9 (2016): 2248–9622.

⁶ Dwi Kusumawati and Dwi Ratmono, "Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia," *Diponegoro Journal of Accounting* 6, no. 1 (2017): 1–15, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18283>.

⁷ Oka Purnawan Widodo and Sudarno, "Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Dan Temuan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini Bpk Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Diponegoro Journal of Accounting* 6, no. 1 (2017): 153–161.

signifikan atas opini audit pada kelemahan sistem pengendalian intern.⁸ Penelitian Oktaria dan Herliansyah, 2019 menunjukkan bahwa temuan material atas kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang mempengaruhi pemberian opini oleh BPK.⁹ Penelitian Siregar dan Rudiansyah, 2019 menunjukkan bahwa temuan atas sistem pengendalian intern memiliki pengaruh negatif terhadap opini audit.¹⁰ Penelitian Surya dan Suparno, 2019 menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.¹¹ Penelitian Syahputra, Hasan dan Rasuli, 2019 menunjukkan bahwa Temuan Pemeriksaan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh signifikan negatif terhadap opini audit.¹² Penelitian Hia, Erlina dan Sirojuzilam, 2020 menunjukkan bahwa Pengendalian Intern Pemerintah Sistem berpengaruh signifikan positif pada keuangan pemerintah daerah kualitas laporan.¹³ Penelitian Bandiyono, 2021 menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh signifikan secara positif terhadap opini audit.¹⁴

Ditemukan hasil penelitian yang bertentangan dengan penelitian diatas pada penelitian Fatimah, Sari dan Rasuli, 2014; W dan Probohudono, 2015; Pamungkas, Ibtida dan Avrian, 2018 menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern bukan faktor penyebab perolehan opini audit. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah, Sari dan Rasuli, 2014 menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern pada struktur pengendalian intern (StPI) dan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

⁸ Luthfina Hamidayanti and Marita Kusuma Wardani, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 2, no. 2 (2018): 96.

⁹ Dewi Oktaria and Yudhi Herliansyah, "Analysis of Weakness of the Internal Control System , Non Compliance with Statutory Provisions and Follow-Up Recommendations Results On the Audit Opinion of Bpk Ri," *International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)* 8, no. 05 (2019): 51–57.

¹⁰ Muhammad Ichsan Siregar and Jumadi Rudiansyah, "Pengaruh Jumlah Temuan Audit Terhadap Opini Audit Kabupaten/Kota Se-Sumatera," *Jurnal Ecoment Global* 4, no. 1 (2019): 101.

¹¹ Juanda Surya and Suparno, "Pengaruh Peran Masyarakat Madani Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 4, no. 2 (2019): 259–269.

¹² T Syahputra, Amir Hasan, and Rasuli, "Pengaruh Pengungkapan Kinerja Keuangan Pemerintah, Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Opini Audit Dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebagai Variabel Pemoderasi," *Jurnal Ekonomi* 27, no. 2 (2019): 112–123.

¹³ Iman Jaya Hia, Erlina, and Sirojuzilam, "Analysis of the Effect of the Government Internal Control System (GICS), Implementation of Government Accounting Standards (GAS), Compliance with Legislation and Regional Asset Management on the Quality of West Nias Regency Government Financial Reports," *International Journal of Research and Review* 7, no. 11 (2020): 31–37.

¹⁴ Agus Bandiyono, "Good Government Governance in The Internal Control System and Audit Opinion," *Jurnal Akuntansi XXV*, no. 01 (2021): 120–137.

(SPPAPB) tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini WTP.¹⁵ Selain itu penelitian W dan Probohudono, 2015 juga menunjukkan bahwa kelemahan atas struktur pengendalian intern (KStPI) tidak berpengaruh terhadap pemberian opini BPK atas kewajaran laporan keuangan.¹⁶ Dan penelitian Pamungkas, Ibtida dan Avrian, 2018 menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern yang diwakili oleh banyaknya temuan sistem pengendalian intern dalam laporan audit atas laporan keuangan pemerintah kota tidak berpengaruh terhadap opini audit.¹⁷ Perbedaan hasil tersebut dijadikan penulis sebagai research gap dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu telah melakukan kajian terhadap penyebab perolehan opini audit. Penelitian oleh Prasetyaningsih, Yuhalfiyah dan Susanto, 2014; W dan Probohudono, 2015; Safitri dan Darsono, 2015; Setiyawati, 2016; Widodo dan Sudarno, 2017; Rosadi, Siyamto dan Aisyiah, 2017; Amaliah, Sarwono, Saptantinah dan Sunarti, 2018; Devi, Abubakar dan Erwin, 2018; Pamungkas, Ibtida dan Avrian, 2018; Siregar dan Rudiansyah, 2019; Oktaria dan Herliansyah, 2019; Hia, Erlina dan Sirojuzilam, 2020; Rafrini Amyulianthy *et al.*, 2020; Bangsawan dan Abbas, 2021 menunjukkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi opini audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyaningsih, Yuhalfiyah dan Susanto, 2014 menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berdampak signifikan terhadap opini audit di BPK.¹⁸ Penelitian W dan Probohudono, 2015 menunjukkan adanya pengaruh negatif atas pemberian opini pada temuan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, penyimpangan administrasi dan ketidakhematan saat pemeriksaan.¹⁹ Penelitian Safitri dan Darsono, 2015 menunjukkan pengaruh signifikan terhadap opini audit atas temuan ketidakpatuhan peraturan perundang-

¹⁵ Desi Fatimah, Ria Nelly Sari, and M. Rasuli, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2014): 1689–1699.

¹⁶ RM Syah Arief Atmaja W and Agung Nur Probohudono, "Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidakpatuhan Dan Kerugian Negara," *INTEGRITAS Jurnal Anti Korupsi* 1, no. 1 (2015): 81–110.

¹⁷ Bambang Pamungkas, Reisa Ibtida, and Cendy Avrian, "Cogent Business & Management Factors Influencing Audit Opinion of the Indonesian Municipal Governments ' Financial Statements Factors Influencing Audit Opinion of the Indonesian Municipal Governments ' Financial Statements," *Cogent Business & Management* 5, no. 1 (2018): 1–18, <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1540256>.

¹⁸ Prasetyaningsih, Yuhalfiyah, and Susanto, "Internal Control System Weakness and Non-Compliance to the Provision of Legislation in Practicing Audit of Local Government in Indonesia."

¹⁹ W and Probohudono, "Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidakpatuhan Dan Kerugian Negara."

undangan.²⁰ Penelitian Setiyawati, 2016 menunjukkan bahwa pendapat opini audit dipengaruhi pada ketidakpatuhan terhadap pelaporan dan akuntansi entitas di pemerintah daerah.²¹ Penelitian Widodo dan Sudarno, 2017 menunjukkan temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berpengaruh nilai signifikansi sebesar 0,000 secara negatif terhadap opini audit.²² Penelitian Rosadi, Siyamto dan Aisyiah, 2017 menunjukkan bahwa opini laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara signifikan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.²³ Penelitian Amaliah, Saptantinah dan Sunarti, 2018 menunjukan bahwa kualitas opini audit laporan keuangan pemerintah di Indonesia dipengaruhi secara signifikan negatif pada ketidakpatuhan terhadap peraturan dalam.²⁴ Penelitian Devi, Abubakar dan Erwin, 2018 menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan secara secara simultan atas kualitas laporan keuangan pada kepatuhan dengan regulasi yang ditaati oleh pemerintah.²⁵ Penelitian Pamungkas, Ibtida dan Avrian, 2018 menunjukkan bahwa temuan yang berkaitan dengan kerugian daerah mempengaruhi opini audit.²⁶ Penelitian Siregar dan Rudiansyah, 2019 menunjukkan jumlah temuan atas pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh negatif terhadap opini audit.²⁷ Penelitian Oktaria dan Herliansyah, 2019 menunjukkan bahwa pemberian opini oleh BPK melihat dan menjadikan temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai faktor yang mempengaruhi.²⁸ Penelitian Hia, Erlina

²⁰ Ni Luh Ketut Shanti Antik Safitri and Darsono, "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah," *Diponegoro Journal of Accounting* 4, no. 1 (2015): 122–133.

²¹ Setiyawati, "Effect of Weaknesses of the Internal Control Systems and Non-Compliance with Statutory Provisions on The Audit Opinion of The Audit Board of The Republic of Indonesia."

²² Widodo and Sudarno, "Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Dan Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini Bpk Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah."

²³ Samsul Rosadi, Yudi Siyamto, and Helti Nur Aisyiah, "Pengaruh Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, Kelamhan Sistem Pengendalian Internal, Kapatuhan Peraturan Perundang-Undangan, Status Daerah Dan Ukuran Daerah Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Tahun 2013," *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM* 03, no. 02 (2017): 99–111.

²⁴ Lucfia Anissatul Amaliah et al., "Analisis of Factor That Affect the Opinion of the BPK Regional Financial Government Report In Indonesia," *The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018 (The 2nd ICTESS 2018)* (2018): 395–411.

²⁵ Prima Citra Devi, Erwin Abubakar, and Keulana Erwin, "An Analysis on the Factors Which Influence Financial Statement Quality of Skpd (Regional Work Unit) At the Binjai Municipal Administration With Organizational Commitment As Moderating Variable," *International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance (IJPBAF)* 1, no. 1 (2018), <http://ijpbaf.net/index.php/ijpbaf/article/view/19>.

²⁶ Pamungkas, Ibtida, and Avrian, "Cogent Business & Management Factors Influencing Audit Opinion of the Indonesian Municipal Governments ' Financial Statements Factors Influencing Audit Opinion of the Indonesian Municipal Governments ' Financial Statements."

²⁷ Siregar and Rudiansyah, "Pengaruh Jumlah Temuan Audit Terhadap Opini Audit Kabupaten/Kota Se-Sumatera."

²⁸ Oktaria and Herliansyah, "Analysis of Weakness of the Internal Control System , Non Compliance with Statutory Provisions and Follow-Up Recommendations Results On the Audit Opinion of Bpk Ri."

dan Sirojuzilam, 2020 menunjukkan bahwa opini audit atau kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi signifikan secara positif pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.²⁹ Penelitian (Rafrini Amyulianthy *et al.*, 2020 menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif yang signifikan atas opini audit pada temuan audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.³⁰ Penelitian Bangsawan dan Abbas, 2021 menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif signifikan sebesar 0,002 atas opini audit pada temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.³¹

Ditemukan hasil penelitian yang bertentangan dengan penelitian diatas pada penelitian Kusumawati dan Ratmono, 2017; Hamidayanti dan Wardani, 2018; Syahputra, Hasan dan Rasuli, 2019 menemukan bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bukan faktor penyebab perolehan opini audit. Penelitian Kusumawati dan Ratmono, 2017 menunjukkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh dengan nilai signifikansi sebesar 0,069 pada opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.³² Penelitian Syahputra, Hasan dan Rasuli, 2019 menunjukkan tidak adanya pengaruh atas opini audit pada temuan pemeriksaan ketidakpatuhan Perundang-undangan.³³ Penelitian Hamidayanti dan Wardani, 2018 menunjukkan bahwa opini audit tidak dipengaruhi atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang dilakukan pemerintah yang ditemukan saat pemeriksaan.³⁴ Perbedaan hasil tersebut dijadikan penulis sebagai research gap dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu telah melakukan kajian terhadap penyebab perolehan opini audit. Penelitian oleh Pratiwi dan Aryani, 2016; Kusumawati dan Ratmono, 2017; Maharani dan

²⁹ Hia, Erlina, and Sirojuzilam, "Analysis of the Effect of the Government Internal Control System (GICS), Implementation of Government Accounting Standards (GAS), Compliance with Legislation and Regional Asset Management on the Quality of West Nias Regency Government Financial Reports."

³⁰ Rafrini Amyulianthy, Andi Sayyidatun Ufairah Anto, and Shinta Budi, "Temuan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia)," *Jurnal Penelitian Akuntansi* 1, no. 1 (2020): 14–27.

³¹ Achdian Anggreny Bangsawan and Ahmad Abbas, "Efek Pelanggaran Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Ketidakpatuhan Peraturan Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Di Sulawesi Selatan," *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 21, no. 02 (2021).

³² Kusumawati and Ratmono, "Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia."

³³ Syahputra, Hasan, and Rasuli, "Pengaruh Pengungkapan Kinerja Keuangan Pemerintah, Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Opini Audit Dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebagai Variabel Pemoderasi."

³⁴ Hamidayanti and Wardani, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah."

Arofah, 2021 menemukan bahwa ketergantungan pemerintah daerah merupakan faktor penyebab perolehan opini audit.

Penelitian Pratiwi dan Aryani, 2016 menunjukkan adanya pengaruh negatif atas opini audit pada tingkat ketergantungan pemerintah daerah.³⁵ Penelitian Kusumawati dan Ratmono, 2017 menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh secara negatif signifikan sebesar 0,000 pada opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah.³⁶ Penelitian Maharani dan Arofah, 2021 menunjukkan pengaruh sebesar 0.027 secara positif pada tingkat ketergantungan daerah kepada pusat terhadap opini BPK.³⁷

Ditemukan hasil penelitian yang bertentangan dengan penelitian diatas pada penelitian Rumihin, Ahuluheluw dan Leiwakabessy, 2019 menemukan bahwa ketergantungan pemerintah daerah bukan faktor penyebab perolehan opini audit. Penelitian Rumihin, Ahuluheluw dan Leiwakabessy, 2019 menunjukkan dana transfer atau ketergantungan tidak memiliki pengaruh sebesar 0,434 pada opini audit.³⁸ Perbedaan hasil tersebut dijadikan penulis sebagai research gap dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu telah melakukan kajian terhadap penyebab perolehan opini audit. Penelitian oleh Pratiwi dan Aryani, 2016 menunjukkan pada pengujian Ordinal Logistic Regression tingkat pendidikan kepala daerah mempunyai pengaruh positif sebesar 0,008 terhadap perolehan opini audit pada tingkat pendidikan S1. Sedangkan pada pengujian Binomial Logistic Regression memiliki signifikansi 0,483 artinya opini audit tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan kepala daerah.³⁹ Perbedaan hasil pada perbedaan uji yang dilakukan dalam satu penelitian yang sama dijadikan penulis sebagai research gap dalam penelitian ini.

Data yang penulis gunakan merupakan data laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2020. Penulis mengembangkan variabel pengaruh kompetensi

³⁵ Ristu Pratiwi and Y Anni Aryani, "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Opini," *Jurnal Akuntansi* 20, no. 2 (2016): 167.

³⁶ Kusumawati and Ratmono, "Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia."

³⁷ Destin Alfianika Maharani and Anastasia Anggarkusuma Arofah, "Determinasi Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini Bpk," *Jurnal Politeknik Caltex Riau* 14, no. 1 (2021): 113–122.

³⁸ Ridolf Rumihin, Nicolas Ahuluheluw, and Theophilia F F. Leiwakabessy, "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pada Kab/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2016-2018," *Journal of Cleaner Production* 19, no. 11 (2019): 1–13, [http://dx.doi.org/10.1016/S0959-6526\(11\)00143-0](http://dx.doi.org/10.1016/S0959-6526(11)00143-0).

³⁹ Pratiwi and Aryani, "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Opini."

penanggungjawab laporan keuangan terhadap opini audit. Selain itu penulis mencoba menghubungkan dengan ajaran syariat islam. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Perbedaan hasil dan tidak konsistennya penelitian terdahulu terkait aspek apa saja yang sungguh mempengaruhi opini audit mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Dan Kompetensi Penanggung Jawab Laporan Keuangan Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2020”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena tentang masih banyaknya opini Selain Wajar Tanpa Pengecualian pada LKPD Tahun 2020 dan perbedaan hasil penelitian. Dan berlandaskan pada masalah yang ada dalam penjelasan yang telah dijelaskan diatas, penulis dalam penelitian ini menentukan pertanyaan penelitian yaitu :

1. Apakah kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah kompetensi penanggung jawab laporan keuangan berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apakah kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Mengetahui apakah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah

3. Mengetahui apakah tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Mengetahui apakah kompetensi penanggung jawab laporan keuangan berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait auditing pada sektor pemerintahan, dan memberikan bukti empiris faktor apa saja yang mempengaruhi opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi baru pada penelitian dibidang auditing terutama pada sektor pemerintah daerah di Indonesia.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi opini audit laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kelemahan sistem penegndalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, dan kompetensi penanggungjawab laporan keuangan.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1. Untuk Pemerintah daerah
Harapannya ulasan dalam penelitian bisa dijadikan motivasi pemerintah daerah agar secara maksimal dengan penuh tanggungjawab untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana sehingga terwujud laporan keuangan yang lebih baik. Semestinya ulasan dalam penelitian ini dijadikan sebagai masukan pemerintah daerah untuk mewujudkan laporan keuangan yang meningkat.
2. Untuk peneliti
Ulasan hasil penelitian seharusnya menjadi pengetahuan baru bagi peneliti terkait faktor apa saja yang mempengaruhi opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan wawasan baru pembaca terkait auditing pada sektor pemerintahan atau sebagai salah satu bahan referensi dan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi disusun dalam lima bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, menerangkan teori yang digunakan yaitu teori agency, dan menjelaskan terkait variabel-variabel yang digunakan. Juga dipaparkan terkait penelitian yang sesuai, hipotesis dan kerangka berfikir penelitian.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan terkait jenis dan sumber data, definisi operasional, dan metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan data.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan, akan mengemukakan tentang analisis populasi dan sampel, deskripsi data penelitian, analisis regresi logistik, model Regresi Logistik dan, hasil analisis regresi logistik dan pembahasan.

Bab V Penutup, berisikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah, dan berisi saran-saran peneliti yang didapatkan setelah melakukan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori terkait menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Pihak *principal* merupakan pihak yang memberikan mandat, sedangkan *agent* merupakan pihak yang melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Jensen dan Meckling, 1976 hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agen*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen.⁴⁰

Masyarakat dan pemerintah daerah sebagai gambaran hubungan *principal* dan *agent* yang terjadi dalam ruang lingkup pemerintahan. Masyarakat mendelegasikan semua kegiatan dan wewenang pengambilan keputusan dalam menyelenggarakan urusan kegiatan pemerintahan. Pemerintah daerah melakukan kegiatan pemerintahan dan pengambilan keputusan atas nama masyarakat. Dalam penelitian ini juga pemerintah daerah melakukan kegiatan dan pengambilan keputusan atas nama masyarakat yang diwakilkan pemberian mandatnya oleh pemerintah pusat. Teori keagenan memandang pemerintah daerah selaku pihak *agent* yang melaksanakan kegiatan atas nama *principal* (masyarakat atau pemerintah pusat) dengan kesadaran penuh akan melakukan tindakan untuk memenuhi kepentingan dan egonya sendiri, sehingga pemerintah daerah selaku pihak *agent* tidak dapat dan sulit dipercaya bahwa tindakanya berpihak baik kepada kepentingan *principal* (masyarakat atau pemerintah pusat). Pemerintah daerah selaku pihak *agent* memiliki informasi dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahanya lebih banyak dibandingkan *principal* (masyarakat atau pemerintah pusat), sehingga menimbulkan asimetri informasi. Adanya lebih banyak informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat memicu untuk mengambil tindakan sesuai dengan keinginan dan minat pribadinya. Bagi prinsipal, dalam hal ini masyarakat, memiliki sedikit informasi akan sangat sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk memastikan bahwa pemerintah

⁴⁰ Michael C. Jensen and William H. Meckling, "Racial Diversity and Its Asymmetry within and across Hierarchical Levels: The Effects on Financial Performance," *Human Relations* 72, no. 10 (1976): 1671–1696.

daerah telah melaksanakan tugasnya sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku maka pemerintah daerah harus diawasi. Penelitian Agriyanto, 2018 mengatakan atasan, auditor internal (BPKP), auditor eksternal (BPK), Inspektorat, dan teman sejawat merupakan orang-orang penting yang dapat mempengaruhi perilaku pemerintah daerah.⁴¹ Auditor eksternal (BPK) sebagai pihak independen menilai kinerja pemerintah daerah dengan memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan sehingga prinsipal yakin dengan kinerja agen yang dinilai dari laporan keuangannya.

2.1.2 Opini Audit

Opini audit dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (11) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang berbunyi “Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan”.⁴² Opini audit BPK adalah pernyataan atas hasil audit laporan keuangan. Opini ini dimuat dan disajikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Terdapat empat jenis opini yaitu, opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*). Mengenai empat opini tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*) atau WTP

Auditor menyatakan opini wajar tanpa pengecualian ketika auditor tidak mendeteksi salah saji yang material secara keseluruhan pada laporan keuangan. Dan laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Apabila terjadi salah saji, salah saji tersebut dianggap tidak material.

2. Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*) atau WDP

Auditor menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika auditor tidak mendeteksi salah saji yang material pada sebagian besar laporan keuangan, kecuali pada akun atau rekening yang menjadi pengecualian. Salah saji yang material tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan.

⁴¹ Ratno Agriyanto, “Model Rekayasa Perilaku Menggunakan Informasi Akuntansi Berbasis Akrua! Pada Organisasi Pemerintah,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 15, no. 1 (2018): 77–103.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

3. Tidak Wajar (*adversed opinion*) atau TW

Opini tidak wajar diberikan oleh auditor ketika auditor menemukan salah saji material pada laporan keuangan. Atau auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat kemudian menyimpulkan bahwa terjadi kesalahan penyajian.

4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*disclaimer of opinion*) atau TMP

Auditor menyatakan opini tidak menyatakan pendapat ketika auditor tidak memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan. Atau auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit.

Penelitian Noviyani, 2019 dan Elviera, 2021 menerangkan bahwa aktifitas audit terdapat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Infitar ayat 10 sampai 12 dan An-Naml Ayat 20 dan 21.⁴³

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (12)

“Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) pengawas yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (amal perbuatanmu). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Infitar [82]: 20-21).⁴⁴

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (20)

لَأَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (21)

“Dia (Sulaiman) memeriksa (pasukan) burung, lalu berkata, “Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Ataukah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas” (QS. An-Naml [27]: 20-21).⁴⁵

Penelitian Omar, 2019 mengkaitkan ayat tersebut dan menjelaskan bahwa malaikat Raqib dan Atid merupakan auditor dan Nabi Sulaiman merupakan pemimpin pelaksanaan audit.⁴⁶ Nabi Sulaiman a.s melakukan pengecekan atau pemeriksaan untuk mencari burung

⁴³ Chyntia Dewi Elviera, “Efektivitas Audit Syariah Di Indonesia Dan Perspektif Menurut Al-Qur'an Dan Hadis,” *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 1 (2021): 74–78.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. h. 881

⁴⁵ Ibid. h. 544

⁴⁶ Mariawati Omar, “Issues and Challenges of Shariah Compliance Auditing in Islamic Financial Institution,” *Advanced International Journal of Banking, Accounting and Finance* 1, no. 1 (2019): 13–24.

hud-hud, dimana dalam proses pencarian ini juga merupakan suatu proses dalam aktivitas audit.

2.1.3 Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (9) PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah yang berbunyi “Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah”.⁴⁷

Sistem pengendalian intern juga dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang berbunyi:

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Berlandaskan penjelasan diatas, sistem pengendalian intern merupakan prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk meyakinkan manajemen bahwa organisasi telah mencapai tujuan. Sistem pengendalian intern berkaitan erat dengan; reliabilitas pelaporan keuangan, efisiensi dan efektifitas operasi, dan ketaatan pada hukum dan peraturan.(Arens, et al., 2008)

Terdapat 5 unsur sistem pengendalian intern pemerintah yang dijelaskan dalam Pasal 13 Ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008 yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.⁴⁹

Unsur sistem pengendalian intern pertama adalah lingkungan pengendalian. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang kondusif untuk penerapan sistem pengendalian dalam lingkungan

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Indonesia, 2006).

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Indonesia, 2008).

⁴⁹ Ibid.

kerjanya. Berlandaskan dalam Pasal 4 PP No. 60 Tahun 2008 lingkungan pengendalian dalam instansi pemerintahan dapat dicapai melalui;

a. penegakan integritas dan nilai etika; b. komitmen terhadap kompetensi; c. kepemimpinan yang kondusif; d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.⁵⁰

Unsur sistem pengendalian intern kedua adalah penilaian risiko. Pimpinan Instansi Pemerintah harus mengidentifikasi risiko berkaitan apa saja yang menghambat tercapainya tujuan Instansi Pemerintah, bersumber dari dalam maupun luar instansi. Kemudian hasil identifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.

Unsur sistem pengendalian intern ketiga adalah kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian merupakan prosedur dan kebijakan untuk memastikan terlaksananya pengendalian berkaitan dengan mengurangi risiko yang telah diidentifikasi dalam penilaian risiko oleh Pimpinan Instansi. Berlandaskan Pasal 18 Ayat (3) PP No. 60 Tahun 2008 kegiatan pengendalian yang dimaksud dalam instansi pemerintahan ialah:

a. revaluasi kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; b. pembinaan sumber daya manusia; c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; d. pengendalian fisik atas aset; e. penetapan dan revaluasi atas indikator dan ukuran kinerja; f. pemisahan fungsi; g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.⁵¹

Unsur sistem pengendalian intern keempat adalah Informasi dan komunikasi. Instansi Pemerintah harus mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat kepada Pimpinan Instansi atau instansi lain yang memerlukannya. Berlandaskan Pasal 42 Ayat (2) PP Nomor 60 Tahun 2008 untuk

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

menciptakan komunikasi informasi yang efektif maka diperlukan pengelolaan, pengembangan dan pembaharuan sistem informasi secara terus menerus, dan menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.⁵²

Unsur sistem pengendalian intern kelima adalah pemantauan pengendalian. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Berlandaskan Pasal 43 Ayat (2) PP Nomor 60 Tahun 2008 pemantauan pengendalian dalam instansi pemerintah dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya.⁵³

Penelitian Karmila dan Hendarsyah, 2019 menerangkan landasan hukum Islam mengenai sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282.⁵⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya” (QS. al-Baqarah [2]: 282).⁵⁵

Tafsir Kementerian Agama RI mengenai potongan ayat ini:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan. Dan hendaklah seorang yang bertugas sebagai penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, jujur, dan adil,

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Karmila Karmila and Decky Hendarsyah, “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Retribusi Boarding Pass Pelabuhan Terhadap Sistem Pengendalian Internal: Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai,” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 3, no. 2 (2019): 158–173, <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/180>.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. h. 63

sesuai ketentuan Allah dan peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Kepada para penulis diingatkan agar janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagai tanda syukur, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya kemampuan membaca dan menulis, maka hendaklah dia menuliskan sesuai dengan pengakuan dan pernyataan pihak yang berutang dan disetujui oleh pihak yang mengutangi. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan apa yang telah disepakati untuk ditulis, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan Pemelihara-nya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripada utang-nya, baik yang berkaitan dengan kadar utang, waktu, cara pembayaran, dan lain-lain yang dicakup oleh kesepakatan.⁵⁶

Ayat ini menjelaskan mengenai hutang piutang. Apabila terjadi transaksi tidak secara langsung maka harus ditulis, dan ditentukan waktu pembayarannya yang ditulis oleh orang yang benar, jujur dan adil. Ini merupakan sebuah bentuk pengendalian yang ada dalam hutang piutang. Penulis mengaitkan ayat ini dengan sistem pengendalian intern. Pengendalian intern dilakukan agar tujuan organisasi tercapai dengan efektivitas, efisiensi, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pemeriksaan laporan keuangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat diartikan taat dan tidak melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan temuan kerugian, temuan potensi kerugian, temuan kekurangan penerimaan, dan temuan penyimpangan administrasi.

Dalam IHPS 1 Tahun 2021 dijelaskan bahwa temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan hal-hal berikut;⁵⁷

- a. Temuan kerugian, merupakan permasalahan ketidakpatuhan berkaitan dengan berkurangnya aset negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan jumlahnya pasti dikarenakan akibat perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun lalai.

⁵⁶ Tafsir Kemenag, "Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282," <https://Quranhadits.Com/>, last modified 2022, accessed November 8, 2022, <https://quranhadits.com/quran/2-al-baqarah/al-baqarah-ayat-282/>.

⁵⁷ *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021*, 2021.

- b. Temuan potensi kerugian, merupakan permasalahan ketidakpatuhan berkaitan dengan adanya perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun lalai, yang dapat mengakibatkan risiko kerugian di masa depan berupa pengurangan uang, surat berharga, dan barang secara nyata dan pasti.
- c. Temuan kekurangan penerimaan, merupakan permasalahan ketidakpatuhan berkaitan dengan penerimaan yang telah menjadi hak negara/daerah atau badan usaha milik negara/daerah namun tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah atau badan usaha milik negara/daerah karena unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Temuan administrasi, merupakan permasalahan ketidakpatuhan berkaitan dengan adanya penyimpangan dari peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset atau operasional perusahaan, namun penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian bagi negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, (kurangnya pendapatan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- e. Temuan indikasi tindak pidana mengungkapkan adanya perbuatan yang diduga memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diancam sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintah pusat membuat peraturan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah mengenai pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara. Pemerintah daerah harus menaatinya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Nisa ayat 59.⁵⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih

⁵⁸ ULUL AZMI, “Penerapan Undang Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 Jo Perda No. 7 Tahun 2006 Di Waru Sidoarjo,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 3, no. 1 (2013): 214–240.

*baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)” (QS. al-Nisa [4]:59).*⁵⁹

Tafsir ringkas Kemenag RI :

Agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam Al Qur'an, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Ulil Amri pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunnahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak.⁶⁰

Ayat ini menjelaskan mengenai ketaatan terhadap penguasa. Penguasa dapat diartikan sebagai pemegang kebijakan. Dalam hal ini yang bertindak sebagai pemegang kebijakan adalah pemerintah. Pemerintah membentuk undang-undang sebagai peraturan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Pemerintah daerah harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggung jawaban keuangan negara.

2.1.5 Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah

Dalam mendanai APBD pemerintah daerah mendapatkan alokasi dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana tranfer yang dilakukan pemerintah pusat sebagai upaya pelaksanaan desentralisasi. Terdapat tiga jenis dana tranfer yaitu, DAU, DAK, dan DBH. Setiap dana tranfer memiliki tujuan yang berbeda. Dana tranfer dikaitkan dengan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Salah satu dana tranfer ialah Dana Alokasi Umum atau DAU, dana ini bertujuan agar terwujudnya kemampuan keuangan antar daerah yang merata. DAU disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. h. 118

⁶⁰ Tafsir Kemenag, “Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 59,” <https://Quranhadits.Com/>, last modified 2022, accessed November 8, 2022, <https://quranhadits.com/quran/4-an-nisa/an-nisa-ayat-59/>.

Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Besarnya DAU ditetapkan dan sesuai Pasal 27 Ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah berbunyi “jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN”.⁶¹ Alokasi anggaran pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah merupakan bentuk tolong-menolong. Tolong-menolong ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surah al-Maidah ayat 2.⁶²

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”(QS. al-Maidah [5]: 2).⁶³

Tafsir Quraish Shihab mengenai potongan ayat ini :

Hendaknya kalian, wahai orang-orang Mukmin, saling menolong dalam berbuat baik dan dalam melaksanakan semua bentuk ketaatan dan jangan saling menolong dalam berbuat kemaksiatan dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Takutlah hukuman dan siksa Allah, karena siksa-Nya amat kejam bagi orang-orang yang menentang-Nya.⁶⁴

Ayat ini menjelaskan mengenai himbauan agar saling menolong dalam kebaikan dan jangan menolong dalam hal kemaksiatan. Dalam pemerintahan di Indonesia pemerintah pusat menolong pemerintah daerah dengan mengalokasikan dananya untuk diberikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Penulis pengaitkan ayat ini dengan tingkat ketergantungan pemerintah daerah.

2.1.6 Kompetensi Penanggung Jawab Laporan Keuangan

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Sedangkan menurut Peraturan BPK Nomor 1

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 2004.

⁶² Rosnani Siregar, “Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam,” *At-Tijarah* 1, no. 1 (2015): 220–221.

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. h. 143-144

⁶⁴ Tafsir Quraish Shihab, “Al-Qur’an Surat Al-Ma’idah Ayat 2,” <https://Quranhadits.Com/>, last modified 2022, accessed November 8, 2022, <https://quranhadits.com/quran/5-al-ma-idah/al-maidah-ayat-2/>.

Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menjelaskan “kompetensi adalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun tentang hal-hal atau bidang tertentu”.⁶⁵ Kompetensi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kompetensi dalam arti pendidikan. Penanggung jawab laporan keuangan pemerintah daerah yang dimaksud ialah kepala daerah yaitu, gubernur/walikota/bupati.

Pendidikan berkaitan dengan tingkat pengetahuan individu. Pendidikan formal sebagai ukuran tingkat pendidikan diharapkan memiliki informasi, pengetahuan dan skill dalam menghadapi berbagai permasalahan sehingga tepat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan. Penanggung jawab laporan keuangan yang juga sebagai pemimpin daerah akan terbantu dengan kompetensi yang dimiliki dalam pengambilan keputusan. Penanggung jawab laporan keuangan yang mempunyai kompetensi yang tinggi memiliki informasi dan pengetahuan yang lebih baik dalam setiap pengambilan keputusan untuk kemajuan daerah. Kompetensi yang dimiliki Penanggung jawab laporan keuangan diperlukan untuk membuat pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Penelitian Asmara dan Hamidah, 2022 menghubungkan prinsip kompetensi dengan sifat fatanah yang berkaitan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Mujadalah ayat 11.⁶⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا فَإِنَّشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”(QS. al-Mujadalah [58]: 11).⁶⁷

Tafsir Quraish Shihab mengenai ayat:

Wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan rasul-Nya, apabila kalian diminta untuk melapangkan tempat duduk bagi orang lain agar ia dapat duduk bersama kalian

⁶⁵ Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Republik Indonesia, 2017.

⁶⁶ Wisnu Widya Asmara and Hamidah Hamidah, “Optimalisasi Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip): Meneladani Sifat Rasulullah Saw,” *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 6, no. 2 (2022): 271–291.

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. h. 803

maka lakukanlah, Allah pasti akan melapangkan segala sesuatu untuk kalian! Juga apabila kalian diminta untuk berdiri dari tempat duduk, maka berdirilah! Allah akan meninggikan derajat orang-orang Mukmin yang ikhlas dan orang-orang yang berilmu menjadi beberapa derajat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang kalian perbuat.⁶⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat dua orang yaitu orang yang beriman dan orang yang berilmu. Penulis mengaitkan ayat ini dikaitkan dengan variabel kompetensi penanggung jawab laporan keuangan. Bahwasanya penanggungjawab laporan keuangan yang memiliki kompetensi yang tinggi dapat mempengaruhi tindakan sehingga akan mendapatkan derajat yang tinggi dalam perolehan opini audit.

2.2 Penelitian sebelumnya

Penelitian sebelumnya digunakan penulis sebagai dasar acuan dalam meluncurkan penelitian. Penulis mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi variabel dependen yaitu opini audit pada penelitian sebelumnya. Selain itu penulis juga menentukan teori dan alat analisis yang digunakan untuk menguji penelitian yang dilakukan, penelitian sebelumnya sebagai referensi pada penelitian penulis. Ringkasan penelitian sebelumnya terangkum dalam tabel yang memuat beberapa jurnal terkait penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut.

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Sebelumnya

No	Penulis, Tahun, Judul	Variabel Independen		Variabel Dependen	Alat Analisis	Hasil
1	Ni Luh Ketut Shanti Antik Safitri dan Darsono (2015) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini	X1	Kelemahan Sistem pengendalian intern	Opini audit	Regresi logistik biner	X1 tidak berpengaruh terhadap Y
		X2	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan			X2 berpengaruh negatif terhadap Y

⁶⁸ Tafsir Quraish Shihab, "Al-Qur'an Surat Al-Mujadalah Ayat 11," <https://Quranhadits.Com/>, last modified 2022, accessed November 8, 2022, <https://quranhadits.com/quran/58-al-mujadalah/al-mujadalah-ayat-11/>.

	Audit Pada Pemerintah Daerah	X3	Realisasi anggaran			X3 tidak bepengaruh terhadap Y
		X4	Opini tahun sebelumnya			X4 bepengaruh terhadap Y
2	RM Syah Arief Atmaja W dan Agung Nur Probohudono (2015) Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidakpatuhan dan Kerugian Negara	X1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (KSPAP) dan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (KSPPAPB)	Pemberian opini BPK atas kewajaran laporan keuangan.	Regresi Logistik	X1 berpengaruh negatif terhadap Y
			Kelemahan struktur pengendalian intern (KStPI)			X1 tidak berpengaruh terhadap Y
		X2	Temuan ketidakpatuhan terhadap perundang- undangan			X2 berpengaruh negatif terhadap Y
		X3	Temuan kerugian negara dan nilai kerugian negara			X3 berpengaruh negatif terhadap Y
		X9	Status Pemerintah Daerah			X9 tidak berpengaruh terhadapY
3	Hari Setiyawati (2016) Effect of Weaknesses of the	X1	The Weaknesses of internal control systems	The opinion of the audit	Ordinal Logistic	X1 berpengaruh terhadap Y

	Internal Control Systems and Non-Compliance with Statutory Provisions on The Audit opinion of The Audit Board of The Republic of Indonesia	X2	Non-compliance with the statutory provisions	board of the Republic of Indonesia	Regression	X2 berpengaruh terhadap Y
4	Samsul Rosadi, Yudi Siyamto, dan Helti Nur Aisyiah (2017) Pengaruh Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan, Status Daerah dan Ukuran Daerah Terhadap Opini Laporan keuangan Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Tahun 2013	X1	Ketepatan waktu penyampaian	Opini laporan keuangan pemerintah daerah di pulau Jawa (Y)	Uji Regresi	X1 berpengaruh terhadap Y
		X2	Kelemahan sistem pengendalian internal			X2 berpengaruh negatif terhadap Y
		X3	Kepatuhan terhadap peraturan (jumlah temuan)			X3 berpengaruh negatif terhadap Y
		X4	Ukuran daerah			X4 tidak berpengaruh terhadap Y
		X5	Status Daerah			X5 tidak berpengaruh terhadap Y
5	Oka Purnawan Widodod, dan Sudarno (2017) Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhadap Opini Bpk Atas	X1	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Penentuan Opini BPK	Ordinal logistic regression	X1 berpengaruh negatif terhadap Y
		X2	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			X2 berpengaruh negatif terhadap Y

	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					
6	Tirtha Syaputra, Amir Hasan dan Rasuli (2019) Pengaruh Pengungkapan Kinerja Keuangan Pemerintah, Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Opini Audit dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagai Variabel Pemoderasi	X1	Pengungkapan Kinerja Keuangan	Opini Audit	Partial Least Square Structural Equation Modeling	X1 tidak berpengaruh terhadap Y
		X2	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			X2 berpengaruh negatif terhadap Y
		X3	Temuan Ketidakpatuhan Perundang-undangan			X3 tidak berpengaruh terhadap Y
7	Ridolf Rumihin, Nicolas Ahuluheluw, dan Theophilia F F. Leiwakabessy (2019) Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pada Kab/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2016-2018	X1	PAD (Wealth)	Opini Audit	Uji Regresi Logistik	X1 tidak berpengaruh terhadap Y
		X2	Tingkat Ketergantungan (DAU) (Depend)			X2 tidak berpengaruh terhadap Y
		X3	Belanja Modal (Expend)			X3 tidak berpengaruh terhadap Y
		X4	Ukuran Pemerintah (Size)			X4 tidak berpengaruh terhadap Y
8	Juanda Surya dan Suparno (2019) Pengaruh Peran Masyarakat Madani dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Opini Audit Laporan	X1	Indeks Pembangunan Manusia	Opini audit atas laporan keuangan pemerintahan daerah	Uji Regresi Logistik	X1 berpengaruh terhadap Y
		X2	Tingkat pendidikan			X2 berpengaruh terhadap Y

	Keuanagnb Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh)	X3	Tingkat pendapatan			X3 berpengaruh terhadap Y
		X4	Sistem Pengendalian Intern			X4 berpengaruh negatif terhadap Y
9	Muhammad Ichsan Siregar dan Jumadi Rudiansyah (2019) Pengaruh Jumlah Temuan Audit Terhadap Opini Audit Kabupaten/Kota Se-Sumatera	X1	Temuan Pemeriksaan SPI	Opini Auditor	Regresi Logistik	X1 berpengaruh negatif terhadap Y
		X2	Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan			X2 berpengaruh negatif terhadap Y
10	Aen Fariah dan Ikhsan Nendi (2020) Faktor - Faktor Yang Mempenagruhi Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kota Cirebon Jawa Barat	X1	Sistem pengendalian internal	Opini Audit BPK Kota Cirebon	Regresi Linier berganda	X1 tidak Berpengaruh terhadap Y
		X2	Ketidakpatuha n terhadap peraturan			X2 berpengaruh terhadap Y
		X3	Opini Audit Tahun Sebelumnya			X3 berpengaruh terhadap Y
11	Achdian Anggreny Bangsawan dan Ahmad Abbas (2021) Efek Pelanggaran Standar Akuntansi Pemerintahan dan Ketidakpatuhan Peraturan terhadap Opini Audit Laporan Keuangan di Sulawesi Selatan	X1	Pelanggaran atas Standar Akuntansi Pemerintahan	Opini audit BPK	Ordinal logistic regressio n	X1 berpengaruhn egatif terhadap Y
		X2	Ketidakpatuha n Terhadap Peraturan Perundang- Undangan			X2 berpengaruh negatif terhadap Y

12	Destin Alfianika Maharani dan Anastasia Anggarkusuma Arofah (2021) Determinasi Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini Bpk	X1	Ukuran Pemerintah	Opini BPK	Regresi Logistik	X1 berpengaruh terhadap Y
		X2	Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pusat			X2 berpengaruh terhadap Y
		X3	Tingkat Kemakmuran PAD			X3 berpengaruh terhadap Y
		X4	Tingkat Kemandirian Daerah			X4 berpengaruh terhadap Y
13	Bambang Pamungkas, Reisya Ibtida, & Cendy Avrian. (2018) Factors influencing audit opinion of the Indonesian municipal governments ' financial statements	X1	Deficiency in ICS	Audit Opinion	ordinal logistic regression	X1 tidak berpengaruh terhadap Y
		X2	Non-compliance			X2 berpengaruh negatif terhadap Y
		X3	Non-conformity			X3 berpengaruh negatif terhadap Y
14	Erny Prasetyaningsi, Gufratul Yuhalfiyah, Heri Susanto. (2014) Internal Control System Weakness and Non-Compliance to the Provision of Legislation in Practicing Audit of Local Government in Indonesia	X1	weakness of internal control system	Opinion of BPK	multiple linear regression	X1 berpengaruh negatif terhadap Y
		X2	non-compliance to the provisions of laws			X2 berpengaruh negatif terhadap Y

15	Dewi Oktaria, & Yudhi Herliansyah. (2019). Analysis of Weakness of the Internal Control System, Non Compliance with Statutory Provisions and Follow-Up Recommendations Results On the Audit Opinion of Bpk Ri	X1	Weakness of the Internal Control System	opinion by the BPK		X1 berpengaruh terhadap Y
		X2	Non Compliance with Statutory Provisions			X2 berpengaruh terhadap Y
		X3	Follow-Up Recommendations Results			X3 berpengaruh terhadap Y
16	Iman Jaya Hia, Erlina, Sirojuzilam. (2020). Analysis of the Effect of the Government Internal Control System (GICS), Implementation of Government Accounting Standards (GAS), Compliance with Legislation and Regional Asset Management on the Quality of West Nias Regency Government Financial Reports.	X1	Government Internal Control System (GICS)	Quality of Financial Reports	structural equation modeling-partial least squares	X1 berpengaruh positif terhadap Y
		X2	Implementation of Government Accounting Standards (GAS)			X2 berpengaruh positif terhadap Y
		X3	Compliance with laws and regulations (CLR)			X3 berpengaruh positif terhadap Y
		X4	Regional Asset Management (RAM)			X4 berpengaruh positif terhadap Y
17	Prima Citra Devi, Erwin Abubakar, dan Keulana Erwin. (2018) An Analysis on the Factors Which Influence Financial Statement Quality of Skpd (Regional	X1	The Competence of Financial Management Officer	multiple regression analysis	Quality of SKPD's Financial Report	X1 berpengaruh positif terhadap Y
		X2	Regulation			X2 berpengaruh

	Work Unit) At the Binjai Municipal Administration With Organizational Commitment As Moderating Variable					positif terhadap Y
		X3	The Role of Internal Audit			X3 tidak berpengaruh terhadap Y
		X4	The Utilization of Information Technology			X4 berpengaruh positif terhadap Y
		Z	Organizational Commitment			
18	Agus Bandiyono. (2021). Good Government Governance in The Internal Control System and Audit Opinion	X	Internal Control System	Audit Opinion	Regressi on Analysis	X1 berpengaruh positif terhadap Y
		Z	Good Government Governance			
19	Lucfia Anissatul A, Aris Eddy Sarwono, Dewi Saptantinah, dan Sunarti. (2018) Analisis of Factor That Affect the Opinion of the BPK Regional Financial Government Report In Indonesia	X1	Non-compliance Regulation	Quality of Audit Opinion	Multiple linear analysis	X1 berpengaruh negatif terhadap Y
		X2	Potential National Disadvantages			X2 tidak berpengaruh terhadap Y

Penelitian yang dilakukan ini memiliki persamaan dengan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel independen kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah. Dan menggunakan alat analisis regresi logistik seperti beberapa peneliti sebelumnya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan menggunakan data audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern terhadap Opini Audit

Sistem pengendalian intern merupakan prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk meyakinkan manajemen bahwa organisasi telah mencapai tujuan. Sistem pengendalian intern berkaitan dengan reabilitas laporan keuangan, efektif dan efisiensi operasi, dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Afiah dan Azwari, 2015 menguji mengenai pengaruh implementasi sistem pengendalian intern pemerintah dan menghasilkan bahwa peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah menjadi bagian penting bagi kualitas pelaporan keuangan di pemerintah daerah.⁶⁹ Penelitian mengenai pengendalian intern juga pernah dilakukan oleh Petrovits, Shakespeare dan Shih, 2011 yang mengungkapkan bahwasanya internal kontrol yang lemah memiliki hubungan negatif dengan pelaporan keuangan.⁷⁰ Penelitian oleh Kesuma dan Ritonga, 2020 mengungkapkan bahwa temuan kelemahan material semakin meningkat berbanding lurus dengan memburuknya opini audit.⁷¹

Keterkaitan teori yang digunakan yaitu masyarakat selaku pihak *principal* menginginkan pemerintah daerah selaku pihak *agent* melakukan implementasi pengendalian intern yang efektif sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara. Ketidakmampuan dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian intern dengan efektif menunjukkan bahwa sistem pengendalian internnya lemah. Temuan kelemahan sistem pengendalian intern sebagai bentuk kegagalan *agent* dalam merancang dan menerapkan sistem pengendalian secara efektif. Laporan keuangan yang baik bukti bahwas sistem pengendalian intern dilaksanakan secara efektif. Kelemahan sistem pengendalian intern diyakini sebagai faktor negatif yang mempengaruhi opini audit.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern terhadap opini audit pernah dilakukan oleh Prasetyaningsih, Yuhalfiyah dan Susanto, 2014; Setiyawati, 2016; Kusumawati dan Ratmono, 2017; Widodo dan Sudarno, 2017;

⁶⁹ Nunuy Nur Afiah and Peny Cahaya Azwari, "The Effect of the Implementation of Government Internal Control System (GICS) on the Quality of Financial Reporting of the Local Government and Its Impact on the Principles of Good Governance: A Research in District, City, and Provincial Government in Sou," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211 (2015): 811–818.

⁷⁰ Christine Petrovits, Catherine Shakespeare, and Aimee Shih, "The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations," *Accounting Review* 86, no. 1 (2011): 325–357.

⁷¹ Indra Kesuma and Irwan Taufiq Ritonga, "Analysis of Relationship between Effectiveness of Internal Control System and Audit Opinions on Local Government Financial Statements," *The Indonesian Journal of Accounting Research* 23, no. 03 (2020): 467–490.

Hamidayanti dan Wardani, 2018; Oktaria dan Herliansyah, 2019; Siregar dan Rudiansyah, 2019; Surya dan Suparno, 2019; Syahputra, Hasan dan Rasuli, 2019. Penelitian Kusumawati dan Ratmono, 2017 menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern secara signifikan berpengaruh negatif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. (Kusumawati and Ratmono, 2017) Penelitian Siregar dan Rudiansyah, 2019 menunjukkan bahwa temuan atas sistem pengendalian intern memiliki pengaruh negatif pada opini audit.⁷² Penelitian Syahputra, Hasan dan Rasuli, 2019 menunjukkan Temuan Pemeriksaan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara signifikan berpengaruh negatif terhadap opini audit.⁷³ Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian :

H1 : Kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap opini audit

2.3.2 Pengaruh Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terhadap Opini Audit

Pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pemeriksaan laporan keuangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat diartikan taat dan tidak melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan temuan kerugian, temuan potensi kerugian, temuan kekurangan penerimaan, dan temuan penyimpangan administrasi.

Keterkaitan teori yang digunakan yaitu masyarakat selaku pihak *principal* menginginkan pemerintah daerah selaku pihak *agent* patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa *agent* tidak taat dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diyakini sebagai faktor negatif yang mempengaruhi opini audit.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap opini audit pernah dilakukan oleh Prasetyaningsih, Yuhalfiyah dan Susanto, 2014; W dan Probohudono, 2015; Setiyawati, 2016; Widodo dan

⁷² Siregar and Rudiansyah, "Pengaruh Jumlah Temuan Audit Terhadap Opini Audit Kabupaten/Kota Se-Sumatera."

⁷³ Syahputra, Hasan, and Rasuli, "Pengaruh Pengungkapan Kinerja Keuangan Pemerintah, Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Opini Audit Dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebagai Variabel Pemoderasi."

Sudarno, 2017; Rosadi, Siyamto dan Aisyiah, 2017; Amaliah et al. 2018; Devi, Abubakar dan Erwin, 2018; Pamungkas, Ibtida dan Avrian, 2018; Siregar dan Rudiansyah, 2019; Oktaria dan Herliansyah, 2019; Amyulianthy, Anto dan Budi, 2020; Hia, Erlina dan Sirojuzilam, 2020; Bangsawan dan Abbas, 2021. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyaningsih, Yuhalfiyah dan Susanto, 2014 menunjukkan pengaruh signifikan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap opini audit di BPK.⁷⁴ Penelitian Amaliah et al. 2018 menunjukan bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan dalam laporan keuangan daerah memiliki pengaruh negatif signifikan pada kualitas opini audit laporan keuangan pemerintah di Indonesia.⁷⁵ Penelitian Bangsawan dan Abbas, 2021 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif sebesar 0,002 atas opini audit pada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.⁷⁶ Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian :

H2: Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap opini audit

2.3.3 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat digambarkan pada besarnya dana tranfer yang diterima pemerintah daerah. Dana tranfer yang diterima daerah yaitu Dana alokasi umum. Pemerintah pusat meyerahkan sepenuhnya atas pengelolaan dan penggunaan DAU kepada pemerintah daerah. Dana alokasi umum yang diberikan pemerintah pusat seharusnya digunakan secara maksimal oleh pemerintah daerah untuk mamakmurkan daerahnya.

Keterkaitan teori yang digunakan yaitu Pemerintah pusat selaku pihak *principal* mengalokasikan dana pada pemerintah daerah selaku pihak *agent* untuk memenuhi kebutuhan daerahnya yang diharapkan digunakan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah daerah sebagai *agent* bertanggungjawab untuk meyampaikan penggunaan dananya kepada pemerintah pusat sebagai *principal*. Besarnya ketergantungan *agent* pada *principal* maka akan besar pula bentuk pertanggungjawaban yang dibuat dan dilaporkan kepada *principal*.

⁷⁴ Prasetyaningsih, Yuhalfiyah, and Susanto, "Internal Control System Weakness and Non-Compliance to the Provision of Legislation in Practicing Audit of Local Government in Indonesia."

⁷⁵ Amaliah et al., "Analisis of Factor That Affect the Opinion of the BPK Regional Financial Gavernment Report In Indonesia."

⁷⁶ Bangsawan and Abbas, "Efek Pelanggaran Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Ketidakpatuhan Peraturan Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Di Sulawesi Selatan."

Selain itu besarnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat memperbesar pula kemungkinan penyelewengan yang dapat dilakukan pemerintah daerah. Besarnya ketergantungan *agent* kepada *principal* diyakini sebagai faktor negatif yang mempengaruhi opini audit.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap opini audit pernah dilakukan oleh Pratiwi dan Aryani, 2016; Kusumawati dan Ratmono, 2017. Penelitian Pratiwi dan Aryani, 2016 menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif pada opini audit.⁷⁷ Penelitian Kusumawati dan Ratmono, 2017 menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif sebesar 0,000.⁷⁸ Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian:

H3: Tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap opini audit

2.3.4 Pengaruh Kompetensi penanggung jawab laporan keuangan terhadap Opini Audit

Kompetensi dalam arti pendidikan merupakan aspek mempengaruhi pengetahuan individu seseorang. Pendidikan berkaitan dengan tingkat pengetahuan individu. Seseorang yang memiliki pendidikan formal memiliki informasi yang lebih banyak. Pengetahuan dan skill dasar dari dapat dilihat dari pendidikan pendidikan yang dimiliki. Penanggung jawab laporan keuangan yang juga sebagai pemimpin daerah akan terbantu dengan kompetensi yang dimiliki dalam pengambilan keputusan. Penanggung jawab laporan keuangan yang mempunyai kompetensi yang tinggi diharapkan lebih bijak dalam pengambilan keputusan untuk kemajuan daerah. Penelitian Prasetyo, 2014 menunjukkan tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia.⁷⁹ Penelitian Damanpour and Schneider, 2008 menunjukkan pendidikan manajer secara positif memengaruhi inovasi, mendukung temuan bahwa melalui pendidikan yang

⁷⁷ Pratiwi and Aryani, "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Opini."

⁷⁸ Kusumawati and Ratmono, "Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia."

⁷⁹ Agus Prasetyo, "Karakteristik Kepala Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Indonesia," 2014.

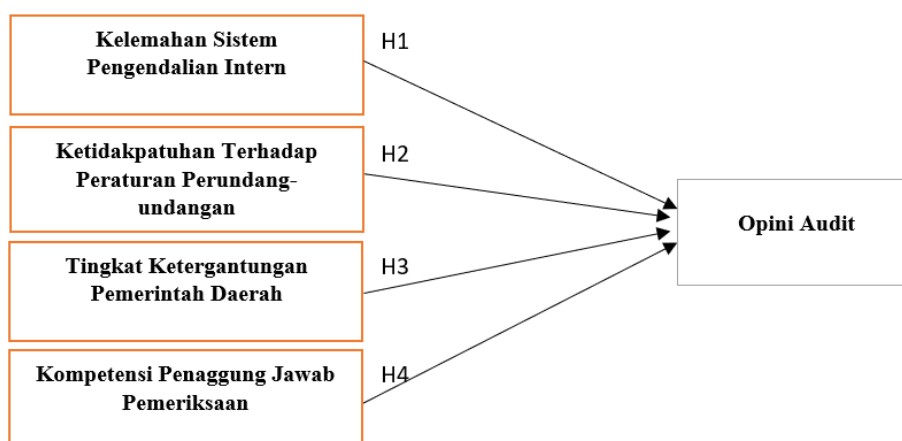
lebih tinggi, peningkatan keahlian dan kapasitas intelektual manajer menguntungkan inovasi dalam organisasi.⁸⁰

Keterkaitan teori yang digunakan yaitu masyarakat selaku pihak *principal* menilai penanggung jawab laporan keuangan yang tidak memiliki kompetensi yang memadai akan memiliki kinerja yang buruk. Penanggung jawab laporan keuangan sebagai pemimpin daerah harus memiliki pengetahuan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Masyarakat selaku pihak *principal* akan mengklaim pemerintah daerah selaku pihak *agent* untuk bijak dalam setiap pengambilan keputusan. Penanggung jawab laporan keuangan yang memiliki kompetensi yang tinggi diharapkan dapat menyajiakan laporan keuangan lebih baik sehingga memperoleh opini audit yang baik. Sehingga diyakini kompetensi penanggung jawab laporan keuangan diyakini sebagai faktor positif yang mempengaruhi opini audit. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian:

H4: Kompetensi penanggung jawab laporan keuangan berpengaruh positif terhadap opini audit

Berdasarkan rumusan hipotesis diatas maka kerangka berpikir penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

Gambar 2. Kerangka Berfikir Penelitian



⁸⁰ Fariborz Damanpour and Marguerite Schneider, "Characteristics of Innovation and Innovation Adoption in Public Organizations: Assessing the Role of Managers," *Journal of Public Administration Research and Theory* 19, no. 3 (2008): 495–522.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan ialah data sekunder. Data bersumber dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2021 (IHPS I 2021) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2021 (IHPS II 2021) yang berisi Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 (LHP LKPD Tahun 2020).

3.2 Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan model penelitian populasi yang mana data yang digunakan meliputi seluruh populasi yang ada yaitu sebanyak 508 Pemerintah Kabupaten/Kota.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumen. Data dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang didapatkan melalui website <https://www.bpk.go.id/ihps> dan mengenai rincian data yang di butuhkan, penulis mengajukan permintaan data pada wibsite <https://e-ppid.bpk.go.id/>, data diminta dengan mengajukan permohonan data pada menu “Permintaan Informasi”. Data lain yang dibutuhkan penulis di ambil dari website <https://wikipedia.or.id/>.

3.4 Variabel dan Definisi Oprasional Data

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini audit (Y). Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kelemahan sistem pengendalian intern (X1), ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (X2), tingkat ketergantungan pemerintah daerah (X3), dan kompetensi penaggung jawab laporan keuangan (X4).

Definisi operasional merupakan definisi yang diberikan pada variabel dengan cara memberi arti, atau mengspesifikasikan kegiatan, atau memberikan suatu operasional yang diberikan untuk mengukur variabel tersebut. Definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.4.1 Opini Audit

Opini audit sebagai variabel dependen. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Ukuran variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy, mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hamidayanti dan Wardani, 2018 yaitu 1 untuk opini WTP dan 0 untuk opini Tidak WTP.

3.4.2 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Kelemahan sistem pengendalian intern merupakan temuan yang memuat permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Dalam penelitian ini variabel kelemahan sistem pengendalian intern diukur berdasarkan jumlah temuan kasus. Ukuran tersebut mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Setiyawati 2016; Siregar dan Rudiansyah 2019. Jumlah kasus permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2021 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2021.

3.4.3 Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan dan administrasi. Dalam penelitian ini variabel ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diukur berdasarkan jumlah temuan kasus. Hal yang sama dilakukan dalam penelitian Setiyawati 2016; Kusumawati dan Ratmono 2017. Jumlah kasus permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2021 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2021.

3.4.4 Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah dinilai dari perbandingan nilai dana alokasi umum dengan total pendapatan. Dalam penelitian ini ukuran tingkat ketergantungan pemerintah daerah dihitung berdasarkan rumus sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati dan Ratmono 2017; Maharani dan Arofah 2021 yaitu:

$$\text{Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah} = \frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan}}$$

3.4.5 Kompetensi Penanggung Jawab Laporan Keuangan

Kompetensi dalam arti pendidikan dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Pendidikan berkaitan dengan tingkat kognitif individu. Kemajuan daerah diharapkan dapat terwujud dengan pendidikan penanggung jawab laporan keuangan sebagai pemimpin daerah, kompetensi pendidikan akan membantu dalam setiap pengambilan keputusan. Ukuran kompetensi penanggung jawab laporan keuangan diukur berdasarkan penelitian Pratiwi dan Aryani 2016 yaitu menggunakan variabel dummy berikut; pendidikan selain strata nilai 1, pendidikan strata satu nilai 2, pendidikan pascasarjana nilai 3.

Tabel 2. Definisi Oprasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikaor
Opini Audit	Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan	Variabel dependen diukur menggunakan model berikut yaitu opini WTP = 1, dan opini tidak WTP = 0
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern.	Variabel kelemahan sistem pengendalian intern diukur berdasarkan jumlah kasus permasalahan
Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menyebabkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan dan administrasi.	Variabel ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diukur berdasarkan jumlah kasus permasalahan

Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah	Tingkat ketergantungan ini dinilai dari besaran DAU. Dana Alokasi Umum ditetapkan minimal 26% dari pendapatan dalam negeri neto	Variabel Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah diukur dengan berikut = $(\text{Dana Alokasi Umum}) / (\text{Total Pendapatan})$
Kompetensi Penanggung Jawab Laporan Keuangan	Kompetensi dalam arti pendidikan dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Pendidikan berkaitan dengan tingkat pengetahuan individu.	Variabel Kompetensi Penanggung Jawab Laporan Keuangan diukur dengan variabel dummy berikut : pendidikan selain strata nilai 1, pendidikan strata satu nilai 2, pendidikan pascasarjana nilai 3

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data berupa analisis statistik deskriptif dan analisis statistik data.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Sugiyono, 2016 mengungkapkan analisis statistik deskriptif merupakan sebagai alat analisis yang mendeskripsikan atau menggambarkan tanpa bermaksud membuat kesimpulan data.⁸¹ Untuk menggambarkan variabel opini audit, kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, kompetensi penanggung jawab laporan keuangan penelitian ini menggunakan nilai mean (rata-rata), nilai max (maximum), dan min (minimum) dalam analisis statistik deskriptif.

3.5.2 Analisis Regresi Logistik

Analisis regresi logistik sebagai alat statistik data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis regresi logistik tidak memerlukan uji heteroskedastisitas, uji asumsi klasik dan uji normalitas pada variabel independennya. Menurut Ghazali, 2018 untuk menguji terdapat

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Ke-23. (Bandung: Alfabeta, 2016).

probabilitas terjadinya variabel dependen yang diprediksi oleh variabel independen dapat menggunakan analisis regresi logistik (logistic regression).⁸² Selain itu tidak memerlukan distribusi normal dalam variabel independen pada analisis regresi logistik. Empat pengujian pada analisis regresi logistik diantaranya, yaitu Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit), Menguji Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit Test), Koefisien Determinasi (Nagelkerke's R Square) dan Matriks Klasifikasi. Penjelasan mengenai keempat pengujian model sebagai berikut:

3.5.2.1 Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

Untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen maka dilakukan uji *overall model fit*. Nilai statistika -2LL atau nilai LR sebagai dasar uji *overall model fit*. Likelihood L merupakan probabilitas bahwa model yang dihipotesakan menggambarkan data input.⁸³ 332 Pengujian dihitung dari perbedaan nilai -2LL block number = 0 dengan nilai -2LL block number = 1. Model regresi yang dikatakan fit dengan data apabila ada penurunan yang terjadi antara nilai -2LL block number = 0 dengan nilai -2LL block number = 1.

3.5.2.2 Uji Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit Test)

Untuk menguji kelayakan model regresi maka dilakukan uji *goodness of fit test*. Nilai signifikansi sebagai dasar dalam uji ini. Uji *goodness of fit test* dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's*. Model ini untuk menguji ada tidaknya perbedaan antara model dengan data, menggunakan hipotesis nol bahwa data empiris sesuai dengan model.⁸⁴ Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

1. H0 diterima, model sesuai dengan nilai observasinya, apabila nilai probabilitas (P-Value) $\geq 0,05$ (nilai signifikansi). Sehingga Goodness of Fit Test bisa menduga nilai observasinya.
2. H0 ditolak, ditemukan perbedaan antara model dengan nilai observasinya signifikan, apabila nilai probabilitas (P-Value) $\leq 0,05$. Sehingga Goodness of Fit Test tidak bisa menduga nilai observasinya.

⁸² Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan IBM SPSS 25*, Ed. 9, cet. (Semarang: UNDIP, 2018). h. 325

⁸³ Ibid. h. 332

⁸⁴ Ibid. h. 333

3.5.2.3 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Untuk melihat besaran pengaruh variabel independen dan variabel dependen secara parsial maka dilakukan uji koefisien determinasi. Nilai *Nagelkerke R Square* sebagai dasar uji ini. *Nagelkerke R Square* merupakan modifikasi dari koefisien *cox and snell* untuk memastikan bahwa nilai akan bervariasi antara 0 (nol) hingga 1 (satu).⁸⁵ Variabel dependen dapat dijelaskan secara lebih baik oleh variabel-variabel independen ketika *Nilai Nagelkarke R Square* mendekati satu, sedangkan nilai *Nagelkerke R Square* menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas ketika mendekati nol.

3.5.2.4 Matriks Klasifikasi

Untuk menjelaskan kekuatan prediksi dari model regresi dapat diketahui pada matriks klasifikasi. Dalam tabel 2 x 2 terhitung nilai estimasi yang benar (correct) dan yang salah (incorrect).⁸⁶ Tabel klasifikasi tersebut menghasilkan ketepatan secara keseluruhan. Tabel Matriks klasifikasi digunakan untuk memprediksi kemungkinan penerimaan opini audit pada laporan keuangan pemerintah daerah.

3.6 Model Regresi Logistik

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian maka perlu dilakukan pengujian hipotesis. Untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesias diuji dengan analisis regresi logistik. Persamaan analisis regresi logistik sebagai berikut:

$$\text{Logit}(P) = \ln \frac{P}{1-P} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

$$\text{Ln} \frac{P}{1-P} = \beta_0 + \beta_1 \text{KSPI} + \beta_2 \text{KTPP} + \beta_3 \text{TKPD} + \beta_4 \text{KPLK}$$

Keterangan:

Ln : log natural

P : Probabilitas logistic

β_0 : Konstanta

⁸⁵ Ibid. h. 333

⁸⁶ Ibid. h. 334

$\beta_1 - \beta_4$	: Koefisien Regresi
KSPI	: Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
KTPP	: Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
TKPD	: Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah
KPLK	: Kompetensi Penanggung Jawab Laporan Keuangan

3.7 Uji Hipotesis

3.7.1 Uji Statistik t

Untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan uji statistik t.⁸⁷ Nilai signifikansi dan nilai t_{hitung} sebagai dasar pada uji ini. Ditetapkan nilai signifikansi sebesar 5%. Adapun kriteria pengambilan keputusan:

1. Hipotesis (H_0) diterima, ketika (P-Value) $> 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, berarti variabel dependen tidak dipengaruhi variabel independen secara individual.
2. Hipotesis (H_0) ditolak, ketika (P-Value) $< 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, berarti variabel dependen dipengaruhi variabel independen secara individual.

3.7.2 Uji Statistik F

Untuk menguji signifikansi secara keseluruhan, apakah variabel-variabel independen yang digunakan dalam model mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel dependen maka dilakukan uji statistik F.⁸⁸ Nilai signifikansi dan nilai f_{hitung} sebagai dasar pada uji ini. Ditetapkan nilai signifikansi sebesar 5%. Adapun kriteria pengambilan keputusan:

1. H_1 diterima dan H_0 ditolak, apabila (P-Value) $< 0,05$ dan $f_{hitung} > f_{tabel}$, berarti variabel dependen dipengaruhi variabel independen.
2. H_1 ditolak dan H_0 diterima, apabila (P-Value) $> 0,05$ dan $f_{hitung} < f_{tabel}$ berarti variabel dependen tidak dipengaruhi variabel independen.

⁸⁷ Ibid. h. 98

⁸⁸ Ibid. h. 98

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data Penelitian

4.1.1 Analisis populasi dan sampel

Dari jumlah awal populasi sebanyak 508 pemerintah kabupaten/kota, terdapat 36 pemerintah kabupaten/kota yang peneliti tidak menemukan kompetensi penanggung jawab laporan keuangan, sehingga tidak dapat dilakukan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 472 pemerintah kabupaten/kota.

4.2 Analisis statistik deskriptif

Analisis statistik deskriptif sebagai alat analisis yang mendeskripsikan atau menggambarkan tanpa bermaksud membuat kesimpulan data. Untuk menggambarkan variabel opini audit, kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, kompetensi penanggung jawab laporan keuangan, penelitian ini menggunakan nilai mean (rata-rata), nilai max (maximum), dan min (minimum) dalam analisis statistik deskriptif.

4.2.1 Deskripsi Opini Audit

Opini Audit merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Daerah yang memperoleh opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dikasih nilai 1 sedangkan yang memperoleh opini Tidak Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dikasih nilai 0. Untuk memudahkan dalam menafsirkan variabel ini maka disajikan dalam tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Deskripsi Frekuensi Variabel Opini Audit

Opini Audit					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK WTP	52	11.0	11.0	11.0
	WTP	420	89.0	89.0	100.0
	Total	472	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 3 Deskripsi Frekuensi Variabel Opini Audit menunjukkan hasil bahwa dari total 472 data unit analisis, terdiri dari 420 pemerintah kabupaten/kota memperoleh opini audit WTP dan 52 pemerintah kabupaten/kota memperoleh opini audit Tidak WTP. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020 terdapat 11% dari 100% pemerintah daerah memperoleh opini audit Tidak WTP sedangkan 89% pemerintah daerah memperoleh opini audit WTP.

4.2.2 Deskripsi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (KSPI) merupakan variabel independen pertama. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah temuan kasus pada laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk memudahkan dalam menafsirkan variabel ini maka disajikan dalam tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Deskripsi Statistik Variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean
Kelemahan sistem pengendalian intern	472	0	48	9.50
Valid N (listwise)	472			

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 4 Deskripsi Statistik Variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (KSPI) menunjukkan hasil bahwa nilai minimum sebesar 0 terdapat pada Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batubara dan nilai maksimum sebesar 48 yang terdapat pada Kabupaten Banggai Kepulauan, 48 Kelemahan sistem pengendalin intern terdiri dari 20 permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan, 14 permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, 14 permasalahan kelemahan Struktur Pengendalian Intern. Nilai rata-rata (mean) dari variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Intern sebesar 9,50, artinya adanya jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern pada laporan keuangan pemerintah daerah memiliki rata-rata jumlah temuan 9,50.

4.2.3 Deskripsi Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (KTPP) merupakan variabel independen kedua. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah temuan kasus pada laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk memudahkan dalam menafsirkan variabel ini maka disajikan dalam tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Deskripsi Statistik Variabel Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean
Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	472	1	35	11.32
Valid N (listwise)	472			

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 5 Deskripsi Statistik Variabel Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (KTPP) menunjukkan hasil bahwa nilai minimum sebesar 1 terdapat pada Kota Tegal Kota tegal 1 temuan permasalahan kerugian yaitu pada biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standart sebesar Rp26.585.000; Kota Surabaya 1 temuan permasalahan administrasi pada penyimpangan peraturan bidang pengelolaan dan perlengkapan; Kabupaten Bangli 1 temuan permasalahan kerugian yaitu pada Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang sebesar Rp284.161.500; dan Kabupaten Karangasem 1 temuan permasalahan kerugian yaitu Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang sebesar Rp54.007.848 dan nilai maksimum sebesar 35 yang terdapat pada Kabupaten Kutai Barat, 35 temuan terdiri dari 22 temuan permasalahan kerugian, 4 permasalahan kekurangan penerimaan, dan 9 temuan permasalahan administrasi. Nilai rata-rata (mean) dari variabel Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebesar 11,32, artinya adanya jumlah temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan pada laporan keuangan pemerintah daerah memiliki rata-rata jumlah temuan 11,32.

4.2.4 Deskripsi Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah

Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah merupakan variabel independen ketiga. Varibel ini diukur berdasarkan rumus yang telah ditetapkan yaitu $TKPD = \frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan}}$. Untuk memudahkan dalam menafsirkan variabel ini maka disajikan dalam tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Deskripsi Statistik Variabel Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah

Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean
Tingkat ketergantungan pemerintah daerah	472	8	79	46.16
Valid N (listwise)	472			

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 6 Deskripsi Statistik Variabel Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (TKPD) menunjukkan hasil bahwa nilai minimum sebesar 8 atau 8% terdapat pada Kabupaten Badung dan nilai maksimum sebesar 79 atau 79% yang terdapat pada Kabupaten Dharmasraya. Nilai rata-rata (mean) dari variabel Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah sebesar 46,16 atau 46,16%, artinya adanya tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat memiliki rata-rata ketergantungan sebesar 0,4616.

4.2.5 Deskripsi Kompetensi Penanggung Jawab Laporan Keuangan

Kompetensi Penanggung Jawab Laporan Keuangan merupakan variabel independen keempat. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Daerah yang memiliki penanggung jawab laporan keuangan dengan pendidikan selain strata dikasih nilai 1, pendidikan Strata 1 (S1) dikasih nilai 2, dan pendidikan pascasarjana dikasih nilai 3. Untuk memudahkan dalam menafsirkan variabel ini maka disajikan dalam tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Deskripsi Frekuensi Variabel Kompetensi Penanggung Jawab Laporan Keuangan

Kompetensi penanggungjawab laporan keuangan				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SELAIN SARJANA	35	7.4	7.4	7.4
SARJANA	167	35.4	35.4	42.8
PASCASARJANA	270	57.2	57.2	100.0
Total	472	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 7 Deskripsi Frekuensi Variabel Kompetensi Penanggung Jawab Laporan Keuangan menunjukkan hasil bahwa bahwa dari total 472 data unit analisis, terdiri dari 35 penanggung jawab laporan keuangan memiliki pendidikan selain strata, 167 penanggung jawab laporan keuangan memiliki pendidikan sarjana, dan 270 penanggung jawab laporan keuangan memiliki pendidikan pascasarjana. Hal ini menunjukkan bahwa penanggung jawab laporan keuangan pemerintah daerah terdapat 7,4% dari 100%

penanggung jawab laporan keuangan memiliki pendidikan selain strata sedangkan 35,4% penanggung jawab laporan keuangan memiliki pendidikan sarjana dan 57,2% penanggung jawab laporan keuangan memiliki pendidikan pascasarjana.

4.3 Analisis Regresi Logistik

Analisis regresi logistik sebagai analisis statistik data yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian model menggunakan alat pengolahan data SPSS (Statistical Package For Social Science) Versi 23. Terdapat empat pengujian model pada analisis regresi logistik yaitu, Menilai keseluruhan Model (Overall Model Test), Menguji Kelayakan Model Regresi (Goodness Fit Test), Koefisien Determinasi, dan Matriks Klasifikasi.

4.3.1 Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

Untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen maka dilakukan uji overall model fit. Nilai statistika -2LL atau nilai LR sebagai dasar uji overall model fit. Likelihood L merupakan probabilitas bahwa model yang dihipotesakan menggambarkan data input (Ghozali, 2018). Pengujian dihitung dari perbedaan nilai -2LL block number = 0 dengan nilai -2LL block number = 1. Penurunan yang terjadi antara nilai -2LL block number = 0 dengan nilai -2LL block number = 1 menunjukkan bahwa model regresi yang baik (Ghozali, 2018). Hasil uji Overall Model Fit disajikan dalam tabel 8 dan tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 8. Likelihood L Awal (Block Number 0)

Iteration History ^{a,b,c}			
Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	342.332	1.559
	2	327.802	2.002
	3	327.445	2.086
	4	327.445	2.089
	5	327.445	2.089

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 327,445

c. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2022

Tabel 9. Likelihood L Akhir (Block Number 1)

Iteration History ^{a,b,c,d}						
Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients			
			Constant	X1_KSPI	X2_KTPP	X3_TKPD X4_KPL K
Step 1	1	319.908	3.305	-.031	-.022	-.028 .027
	2	289.219	5.865	-.055	-.045	-.061 .041
	3	285.081	7.427	-.066	-.058	-.083 .045
	4	284.948	7.765	-.068	-.061	-.088 .046
	5	284.948	7.778	-.068	-.061	-.089 .046
	6	284.948	7.778	-.068	-.061	-.089 .046

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 327,445

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 8 dan tabel 9 bahwa perbandingan nilai -2 Log Likelihood awal(block number = 0) sebesar 327,445 dan setelah variabel bebas dimasukan pada model regresi, maka nilai -2 Log Likelihood akhir (block number = 1) adalah sebesar 284,948.

Hasil tersebut menunjukkan terjadi penurunan nilai antara -2 Log Likelihood awal dan akhir sebesar 42,497. Penurunan nilai -2 Log Likelihood ini dapat diartikan bahwa penambahan variabel bebas ke dalam model dapat memperbaiki model fit serta menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

4.3.2 Uji Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit Test)

Kelayakan model regresi dinilai menggunakan uji *Hosmer and Lemeshow's* dengan melihat nilai signifikansi *chi-square* pada output uji *Hosmer and Lemeshow's*. Apabila nilai signifikansi dari uji *Hosmer and Lemeshow's* > 0,05, H0 diterima, model sesuai dengan nilai observasinya. *Goodness of Fit Test* bisa memprediksi nilai observasinya. Hasil uji kelayakan model regresi disajikan dalam tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10. Uji Kelayakan Model Regresi

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	7.729	8	.460

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 10 Uji Kelayakan Model Regresi menunjukkan bahwa nilai *chi-square* sebesar 7,729 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0460 atau $\text{sig} > 0.05$ ($0,460 > 0,05$), maka H_0 diterima. Bararti dalam penelitian ini tidak terjadi perbedaan antara model dengan data dengan signifikan. Sehingga penelitian ini mampu dan layak untuk memprediksi nilai observasinya.

4.3.3 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Nilai *Nagelkerke R Square* sebagai dasar uji ini. Koefisien *cox and snell* dimodifikasi menjadi nilai *Nagelkerke R Square* untuk memastikan bahwa nilai akan bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Hasil koefisien determinasi disajikan dalam tabel 11.

Tabel 11. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	284.948 ^a	.086	.172

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 11 uji koefisien determinasi nilai *Cox and Snell's R Square* dan *Nagelkerke's R Square* berturut-turut sebesar 0,086 dan 0,172 artinya variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 17,2% sedangkan sebesar 82,8% dipengaruhi oleh variabel di luar model penelitian.

4.3.4 Matrik klasifikasi

Matriks Klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan penerimaan opini audit pada laporan keuangan pemerintah daerah. Tabel 12 menyajikan matriks klasifikasi sebagai berikut.

Tabel 12. Klasifikasi Tabel

Classification Table ^a					
	Observed	Predicted			
		Opini Audit		Percentage Correct	
		TIDAK WTP	WTP		
Step 1	Opini Audit TIDAK WTP	3	49	5.8	
	WTP	2	418	99.5	
	Overall Percentage			89.2	

a. The cut value is ,500

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2022

Hasil analisis regresi tabel klasifikasi digambarkan berdasarkan tabel 12 bagaimana model dapat menduga kemungkinan penerimaan opini audit WTP adalah sebesar 99,5%. Berarti dengan menggunakan model regresi tersebut, terdapat 418 LKPD (99,5%) yang diduga akan menerima opini audit WTP dari awal 420 LKPD yang mengantongi opini audit WTP. Kekuatan dugaan dari model regresi untuk menduga kemungkinan LKPD mengantongi opini audit Tidak WTP adalah 5,8%. Hal ini berarti dengan model regresi tersebut, terdapat 3 LKPD (5,8%) yang diduga mengantongi opini Tidak WTP dari total 52 LKPD yang menerima opini Tidak Wajar. Sedangkan secara keseluruhan kekuatan prediksi dari model regresi untuk mengklasifikasikan observasinya dalam penelitian ini adalah sebesar 89,2%.

4.4 Model Regresi Logistik

Analisis regresi logistik (logistic regression), analisis ini melihat pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (KSPI), Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (KTPP), Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (TKPD), dan Kompetensi Penanggung Jawab Laporan Keuangan (KPLK) terhadap Opini Audit (OPINI) pada laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2020.

Tabel 13. Hasil Analisis Regresi Logistik

Variables in the Equation									
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I.for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	X1_KSPI	-.068	.027	6.302	1	.012	.934	.886	.985
	X2_KTPP	-.061	.032	3.528	1	.060	.941	.883	1.003

X3_TKPD	-.089	.018	23.314	1	.000	.915	.883	.949
X4_KPLK	.046	.246	.035	1	.851	1.047	.647	1.694
Constant	7.778	1.239	39.436	1	.000	2386.958		

a. Variable(s) entered on step 1: X1_KSPI, X2_KTPP, X3_TKPD, X4_KPLK.

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2022

$$\text{Logit}(P) = \ln \frac{P}{1-P} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

$$\text{OPINI} = 7,778 - 0,068\text{KSPI} - 0,061\text{KTPP} - 0,089\text{TKPD} + 0,046\text{KPLK}$$

Variabel dependen (OPINI) merupakan variabel binary, dengan skor 1 atau 0. Skor 1 menggambarkan terjadinya peristiwa, WTP, dan skor 0 menggambarkan tidak terjadinya peristiwa, Tidak WTP. Nilai Y terbatas dengan dua kemungkinan antara 1 atau 0. Sedangkan nilai hasil persamaan tidak terbatas bisa di bawah 0 atau diatas 1. Penalaran nilai logit sebagai representasi tingkat propabilitas bisa dilakauakn dengan merubah atau mentransformasikan nilai logit tersebut menjadi nialai propabilitas. Sehingga nilai taksiran yang diprediksikan dapat merentang dari 0 (terendah) sampai 1 (tertinggi). Transformasi dari nilai logit menjadi nilai proporsi/probabilitas tersebut dapat dilakukan dengan rumus berikut:

$$p = e^{LO}/(1+e^{LO})$$

atau

$$p = O/(1+O)$$

Keterangan:

LO : log odds

P : Probabilitas logistic

e : Eksponen

O : Odds

Dari hasil perhitungan analisis regresi maka interprestasi koefisien regresi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (α) sebesar 7,778, memiliki nilai positif artinya bahwa jika semua variabel independen yaitu kelemahan sistem pengendalian intern (KSPI), ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (KTPP), tingkat

ketergantungan pemerintah daerah (TKPD) dan kompetensi penanggung jawab laporan keuangan (KPLK) nilainya nol atau tetap (konstan), maka nilai konstan sebesar 7,778. Dengan kata lain apabila variabel independen tidak diikuti sertakan dalam penelitian maka nilai Opini Audit (OPINI) adalah sebesar 7,778 yang berarti odds opini audit adalah WTP menjadi sebesar $e^{7,778}$. Nilai logit ditransformasikan menjadi nilai propabilitas agar nilai taksiran yang diprediksi dapat merentang dari 0 (terendah) sampai 1 (tertinggi).

$$p = e^{LO}/(1+e^{LO})$$

$$p = e^{7,778}/(1+e^{7,778})$$

$$p = 2,71828^{7,778}/(1+2,71828^{7,778})$$

$$p = 2387,482/(1+2387,482)$$

$$p = 2387,482/2388,482$$

$$p = 0,999581324 \sim 0,999.$$

Nilai propabilitas sebesar 0,999 mendekati 1, Artinya propabilitas kemungkinan terjadi peristiwa (WTP) lebih besar dibandingkan kemungkinan tidak terjadi peristiwa (Tidak WTP). Atau LKPD memiliki kemungkinan sebesar 99,9% untuk berhasil WTP ketika tidak ada variabel KSPI, KTPP, TKPD, dan KPLK.

2. Nilai koefisien Variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (KSPI) sebesar - 0,068, memiliki nilai negatif. Apabila terjadi kenaikan satu jumlah temuan masalah Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (KSPI) ketika variabel lain konstan (tetap), maka terjadi perubahan nilai Opini Audit (OPINI) sebesar - 0,068. Atau setiap kenaikan satu jumlah temuan masalah Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (KSPI) akan menurunkan nilai Opini Audit (OPINI) sebesar 0,068.
3. Nilai koefisien Variabel Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (KTPP) sebesar - 0,061, memiliki nilai negatif. Apabila terjadi kenaikan satu jumlah temuan masalah Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (KTPP) ketika variabel lain konstan (tetap), maka terjadi perubahan nilai Opini Audit (OPINI) sebesar - 0,061. Atau setiap kenaikan satu jumlah temuan masalah Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (KTPP) akan menurunkan nilai Opini Audit (OPINI) sebesar 0,061.
4. Nilai koefisien Variabel Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (TKPD) sebesar - 0,089, memiliki nilai negatif. Apabila terjadi kenaikan satu nilai Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (TKPD) ketika variabel lain konstan (tetap), maka terjadi perubahan nilai Opini Audit (OPINI) sebesar - 0,089. Atau setiap

kenaikan satu nilai Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (TKPD) akan menurunkan nilai Opini Audit (OPINI) sebesar 0,089.

5. Nilai koefisien Variabel Kompetensi Penanggung Jawab Laporan Keuangan (KPLK) sebesar 0,046, memiliki nilai positif. Apabila terjadi kenaikan satu Kompetensi Penanggung Jawab Laporan Keuangan (KPLK) ketika variabel lain konstan (tetap), maka terjadi perubahan nilai Opini Audit (OPINI) sebesar 0,046. Atau setiap kenaikan satu Kompetensi Penanggung Jawab Laporan Keuangan (KPLK) akan meningkatkan nilai Opini Audit (OPINI) sebesar 0,046.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Statistik t

Untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan uji statistik t. Apakah variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, dan Kompetensi Penanggung Jawab Laporan Keuangan secara masing-masing mampu mempengaruhi variabel dependen yaitu opini Audit. Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dan mengetahui nilai signifikan sebesar 5% merupakan cara menetapkan hipotesis ditolak atau diterima, mengenai kriteria dijelaskan sebagai berikut:

1. Hipotesis (H_0) diterima, ketika (P-Value) $> 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, berarti variabel dependen tidak dipengaruhi variabel independen secara individual.
2. Hipotesis (H_0) ditolak, ketika (P-Value) $< 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, berarti variabel dependen dipengaruhi variabel independen secara individual.

Tabel 14. Uji t

Variables in the Equation								
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)
								Lower Upper
Step 1 ^a	X1_KSPI	-.068	.027	6.302	1	.012	.934	.886 .985
	X2_KTPP	-.061	.032	3.528	1	.060	.941	.883 1.003
	X3_TKPD	-.089	.018	23.314	1	.000	.915	.883 .949
	X4_KPLK	.046	.246	.035	1	.851	1.047	.647 1.694
	Constant	7.778	1.239	39.436	1	.000	2386.958	

a. Variable(s) entered on step 1: X1_KSPI, X2_KTPP, X3_TKPD, X4_KPLK.

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2022

Diketahui total pengamatan atau n adalah 472, dan total variabel (independen dan dependen) atau k adalah 5, nilai *degree of freedom* (df) yaitu $= n - k = 472 - 5 = 467$, dengan signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan menggunakan rumus *insert function* pada Ms Excel, t_{tabel} dapat dihitung sebagai berikut:

$$t_{\text{tabel}} = \text{TINV}(\text{Probability}, \text{deg_freedom})$$

$$t_{\text{tabel}} = \text{TINV}(0,05; 467)$$

$$t_{\text{tabel}} = 1,965057$$

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi logistik berdasarkan tabel dapat diperoleh, disajikan sebagai berikut:

1) Pengujian Hipotesis pertama (H_1)

Hipotesis pertama (H_1) adalah kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap opini audit. Pada hasil uji t variabel kelemahan sistem pengendalian intern memiliki nilai t_{hitung} sebesar 6,302, berarti lebih besar dari t_{tabel} (1,965057) dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,012, berarti lebih kecil dari tingkat signifikannya $\alpha = 0,05$ maka hipotesis ke-1 **diterima**. Ini berarti kelemahan sistem pengendalian intern **berpengaruh negatif** secara signifikan terhadap opini audit. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap opini audit.

2) Pengujian Hipotesis kedua (H_2)

Hipotesis kedua (H_2) adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap opini audit. Pada hasil uji t variabel ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,528, berarti lebih besar dari t_{tabel} (1,965057) dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,060, berarti lebih besar dari tingkat signifikannya $\alpha = 0,05$ maka hipotesis ke-2 **ditolak**. Ini berarti ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan **tidak berpengaruh** secara signifikan terhadap opini audit. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap opini audit.

3) Pengujian Hipotesis ketiga (H_3)

Hipotesis ketiga (H_3) adalah tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap opini audit. Pada hasil uji t variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah memiliki nilai t_{hitung} sebesar lebih besar 23,314, berarti lebih besar dari t_{tabel}

(1,965057) dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000, berarti lebih kecil dari tingkat signifikannya $\alpha = 0,05$ maka hipotesis ke-3 **diterima**. Ini berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah **berpengaruh negatif** secara signifikan terhadap opini audit. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini audit.

4) Pengujian Hipotesis keempat (H_4)

Hipotesis keempat (H_4) adalah kompetensi penanggung jawab laporan keuangan berpengaruh positif terhadap opini audit. Pada hasil uji t variabel kompetensi penanggung jawab laporan keuangan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,035, berarti lebih kecil dari t_{tabel} (1,965057) dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,851, berarti lebih besar dari tingkat signifikannya $\alpha = 0,05$ maka hipotesis ke-4 **ditolak**. Ini berarti kompetensi penanggung jawab laporan keuangan **tidak berpengaruh** secara signifikan terhadap opini audit. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis keempat yang menyatakan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap opini audit.

4.5.2 Uji Statistik F

Untuk menguji signifikansi secara keseluruhan, apakah variabel-variabel independen yang digunakan dalam model mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel dependen maka dilakukan uji statistik F. Uji F diuji dengan *omnibus tests of model coefficients*. Untuk mengetahui variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, dan Kompetensi Penanggung Jawab Laporan Keuangan mampu mempengaruhi variabel dependen yaitu opini audit. Membandingkan f_{hitung} dengan f_{tabel} dan mengetahui nilai signifikan sebesar 5% merupakan cara menetapkan hipotesis ditolak atau diterima, mengenai kriteria dijelaskan sebagai berikut:

1. H_1 diterima dan H_0 ditolak, apabila (P-Value) $< 0,05$ dan $f_{hitung} > f_{tabel}$, berarti variabel dependen dipengaruhi variabel independen.
2. H_1 ditolak dan H_0 diterima, apabila (P-Value) $> 0,5$ dan $f_{hitung} < f_{tabel}$ berarti variabel dependen tidak dipengaruhi variabel independen.

Tabel 15. Uji F

Omnibus Tests of Model Coefficients		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	42.497	4	.000
	Block	42.497	4	.000
	Model	42.497	4	.000

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2022

Diketahui total pengamatan atau n adalah 472, dan total variabel (independen dan dependen) atau k adalah 5, nilai *degree of freedom* (df_1) yaitu $k - 1 = 5 - 1 = 4$, dan (df_2) $= n - k = 472 - 5 = 467$, dengan signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan menggunakan rumus *insert function* pada Ms Excel, f_{tabel} dapat dihitung sebagai berikut:

$$f_{tabel} = \text{FINV}(\text{Probability}; \text{deg_freedom1}; \text{deg_freedom2})$$

$$f_{tabel} = \text{FINV}(0,05; 4; 467)$$

$$f_{tabel} = 2,391033$$

Berdasarkan tabel 15 menunjukkan nilai f_{hitung} sebesar 42,575, berarti lebih besar dari f_{tabel} (2,391033) dengan tingkat signifikansi ($0,000 < 0,05$). Dengan ini maka disimpulkan variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, dan Kompetensi Penanggung Jawab Laporan Keuangan berpengaruh terhadap opini audit.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Opini Audit

Hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap opini audit, hipotesis diterima. Karena ulasan penelitian pada tabel 14 memiliki nilai t_{hitung} sebesar 6,302 atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,302 > 1,965057$) dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,012 atau $p\text{-value} < 0,05$ ($0,012 < 0,05$). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya variabel kelemahan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh secara parsial pada opini audit dengan arah korelasi negatif.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori, masyarakat selaku pihak *principal* menginginkan pemerintah daerah selaku pihak *agent* melakukan implementasi pengendalian inten yang efektif sebagai dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Penelitian ini konsisten dan mendukung penelitian Prasetyaningsih,

Yuhalfiyah dan Susanto, 2014; Kusumawati dan Ratmono, 2017; Widodo dan Sudarno, 2017; Siregar dan Rudiansyah, 2019; Syahputra, Hasan dan Rasuli, 2019 yang menunjukkan bahwa temuan kelemahan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh pada opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam al-quran surah al baqarah ayat 282 menjelaskan pentingnya sistem pengendalian intern terkait pengendalian apabila terjadi transaksi hutang piutang. Jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern memberikan bukti pengaruh negatif pada opini audit. Semakin banyaknya temuan kelemahan sistem pengendalian intern maka akan semakin buruk opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh atau sebaliknya semakin sedikit temuan kelemahan sistem pengendalian intern maka akan semakin baik opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fatimah, Sari dan Rasuli, 2014; W dan Probohudono, 2015; Pamungkas, Ibtida dan Avrian, 2018 yang menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern tidak memiliki pengaruh pada opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.

4.6.2 Pengaruh Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini Audit

Hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap opini audit, hipotesis ditolak. Karena ulasan penelitian pada tabel 14 memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,528 atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,528 > 1,965057) dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,060 atau $p\text{-value} > 0,05$ (0,060 > 0,05). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya variabel ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak memiliki pengaruh parsial pada opini audit dengan arah korelasi negatif.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori, masyarakat selaku pihak *principal* menginginkan pemerintah daerah selaku pihak *agent* patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Namun hasil ini konsisten dan mendukung penelitian Kusumawati dan Ratmono, 2017; Hamidayanti dan Wardani, 2018; Syahputra, Hasan dan Rasuli, 2019 yang menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak memiliki pengaruh pada opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak memiliki pengaruh pada opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Jumlah temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang banyak tidak mengindikasikan perolehan opini audit yang lebih buruk. Karena opini merupakan penilaian penyajian laporan keuangan dinilai secara keseluruhan dan merupakan kesimpulan yang menyeluruh, bukan hanya kesimpulan atas temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Prasetyaningsih, Yuhafiyah dan Susanto, 2014; W dan Probohudono, 2015; Safitri dan Darsono, 2015; Setiyawati, 2016; Widodo dan Sudarno, 2017; Rosadi, Siyamto dan Aisyiah, 2017; Amaliah, Sarwono, Saptantinah dan Sunarti, 2018; Devi, Abubakar dan Erwin, 2018; Pamungkas, Ibtida dan Avrian, 2018; Siregar dan Rudiansyah, 2019; Oktaria dan Herliansyah, 2019; Hia, Erlina dan Sirojuzilam, 2020; Rafrini Amyulianthy *et al.*, 2020; Bangsawan dan Abbas, 2021 yang menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.

4.6.3 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit

Hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap opini audit, hipotesis diterima. Karena ulasan penelitian pada tabel 14 memiliki nilai t_{hitung} sebesar 23,314 atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($23,314 > 1,965057$) dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000 atau $p\text{-value} < 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah memiliki pengaruh secara parsial pada opini audit dengan arah korelasi negatif.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori, pemerintah pusat selaku pihak *principal* menyalurkan dana kepada pemerintah daerah selaku pihak *agent* untuk mendanai kebutuhan daerahnya yang diharapkan digunakan dengan sebaik-baiknya. Hasil penelitian ini konsisten dan mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Aryani, 2016; Kusumawati dan Ratmono, 2017 yang menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam al-quran surah al maidah ayat 2 menjelaskan terkait tolong menolong dalam hal kebaikan. Tolong menolong pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) seharusnya mendorong kemandirian pemerintah daerah dengan

memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah dapat mempengaruhi opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, semakin besar pula pertanggungjawabannya terhadap pemerintah pusat dan memperbesar pula kemungkinan penyelewengan yang dapat dilakukan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rumihin, Ahuluheluw and Leiwakabessy, 2019 yang menunjukkan bahwa bahwa pengaruh tingkat ketergantungan yang diproporsikan dengan dana transfer tidak berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.

4.6.4 Pengaruh Kompetensi Penanggung Jawab Laporan Keuangan Terhadap Opini Audit

Hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan bahwa kompetensi penanggung jawab laporan keuangan berpengaruh positif terhadap opini audit, hipotesis ditolak. Karena ulasan penelitian pada tabel 14 memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,035 atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,035 < 1,965057$) dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,851 atau $p\text{-value} > 0,05$ ($0,851 > 0,05$). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya variabel kompetensi penanggung jawab laporan keuangan tidak memiliki pengaruh parsial pada opini audit.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori, masyarakat selaku pihak *principal* menilai penanggung jawab laporan keuangan yang tidak memiliki kompetensi yang memadai akan memiliki kinerja yang buruk. Hasil penelitian ini konsisten dan mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Aryani, 2016 pada uji *binomial logistic regression* yang menunjukkan tingkat pendidikan kepala daerah yang diukur dari pendidikan formal tidak memiliki pengaruh pada opini audit dengan signifikansi sebesar 0,483.

Tingkat kompetensi penanggung jawab laporan keuangan yang diukur dengan tingkat pendidikan formal yaitu pendidikan selain S1, pendidikan S1, dan pendidikan di atas S1, yang diharapkan penanggung jawab laporan keuangan yang memiliki kompetensi yang lebih baik akan bijak dalam setiap pengambilan keputusan. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya tingkat pendidikan formal sebagai ukuran kompetensi, tidak cukup sebagai tolak ukur kompetensi yang dimiliki penanggung jawab laporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan memberikan bukti apakah kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tingkat ketergantungan pemerintah daerah dan kompetensi penanggung jawab laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap opini audit atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan 472 data laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020 yang telah dilakukan pengujian analisis menggunakan analisis regresi logistik. Berikut merupakan hasil penelitian yang disimpulkan dengan menjawab pertanyaan rumusan masalah penelitian:

1. Penelitian ini membuktikan berdasarkan hasil regresi logistik variabel kelemahan sistem pengendalian intern memiliki nilai signifikansi sebesar 0,012 atau $\text{sig} < 0,05$, dengan arah negatif yang ditunjukkan pada nilai koefisien sebesar -0,068. Disimpulkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Penelitian ini membuktikan berdasarkan hasil regresi logistik variabel ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki nilai signifikansi sebesar -0,060 atau $\text{sig} > 0,05$, dengan arah negatif yang ditunjukkan pada nilai koefisien sebesar -0,061. Disimpulkan bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Penelitian ini membuktikan berdasarkan hasil regresi logistik variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 atau $\text{sig} < 0,05$, dengan arah negatif yang ditunjukkan pada nilai koefisien sebesar -0,089. Disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Penelitian ini membuktikan berdasarkan hasil regresi logistik variabel kompetensi penanggung jawab laporan keuangan memiliki nilai signifikansi sebesar -0,851 atau $\text{sig} > 0,05$, dengan arah positif yang ditunjukkan pada nilai koefisien sebesar 0,046. Disimpulkan bahwa kompetensi penanggung jawab laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.

5.2 Saran

Berlandaskan bukti dalam penelitian yang telah dilakukan, peneliti bermaksud memberikan masukan pada pemerintah daerah sebagai evaluasi dan pada peneliti selanjutnya, sebagai berikut;

1. Peneliti menyarankan pemerintah daerah harus bekerja lebih untuk meningkatkan pengendalian internal. Penelitian ini membuktikan bahwasanya temuan atas sistem pengendalian internal merupakan faktor yang negatif mempengaruhi opini audit atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota.
2. Peneliti menyarankan pemerintah daerah harus lebih mandiri dalam mendanai APBD dengan memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah. Penelitian ini membuktikan bahwasanya besarnya DAU yang diberikan pemerintah pusat merupakan faktor yang secara negatif mempengaruhi opini audit atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota
3. Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih banyak faktor apa saja yang mempengaruhi perolehan opini audit atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nunuy Nur, and Peny Cahaya Azwari. "The Effect of the Implementation of Government Internal Control System (GICS) on the Quality of Financial Reporting of the Local Government and Its Impact on the Principles of Good Governance: A Research in District, City, and Provincial Government in Sou." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211 (2015): 811–818.
- Agriyanto, Ratno. "Model Rekayasa Perilaku Menggunakan Informasi Akuntansi Berbasis Akrua Pada Organisasi Pemerintah." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 15, no. 1 (2018): 77–103.
- Amaliah, Lucfia Anissatul, Aris Eddy Sarwono, Dewi Saptantinah, and Sunarti. "Analisis of Factor That Affect the Opinion of the BPK Regional Financial Government Report In Indonesia." *The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018 (The 2nd ICTESS 2018)* (2018): 395–411.
- Amyulianthy, Rafrini, Andi Sayyidatun Ufairah Anto, and Shinta Budi. "Temuan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia)." *Jurnal Penelitian Akuntansi* 1, no. 1 (2020): 14–27.
- Asmara, Wisnu Widya, and Hamidah Hamidah. "Optimalisasi Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip): Meneladani Sifat Rasulullah Saw." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 6, no. 2 (2022): 271–291.
- AZMI, ULUL. "Penerapan Undang Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 Jo Perda No. 7 Tahun 2006 Di Waru Sidoarjo." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 3, no. 1 (2013): 214–240.
- Bandiyono, Agus. "Good Government Governance in The Internal Control System and Audit Opinion." *Jurnal Akuntansi XXV*, no. 01 (2021): 120–137.
- Bangsawan, Achdian Anggreny, and Ahmad Abbas. "Efek Pelanggaran Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Ketidakpatuhan Peraturan Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 21, no. 02 (2021).
- BPK RI. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021*, 2021.
- . *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, Dan*

- Pemberian Keterangan Ahli, 2020.
- . *Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Republik Indonesia*, 2017.
- Damanpour, Fariborz, and Marguerite Schneider. “Characteristics of Innovation and Innovation Adoption in Public Organizations: Assessing the Role of Managers.” *Journal of Public Administration Research and Theory* 19, no. 3 (2008): 495–522.
- Devi, Prima Citra, Erwin Abubakar, and Keulana Erwin. “An Analysis on the Factors Which Influence Financial Statement Quality of Skpd (Regional Work Unit) At the Binjai Municipal Administration With Organizational Commitment As Moderating Variable.” *International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance (IJPBAF)* 1, no. 1 (2018). <http://ijpbaf.net/index.php/ijpbaf/article/view/19>.
- Elviera, Chyntia Dewi. “Efektivitas Audit Syariah Di Indonesia Dan Perspektif Menurut Al-Qur’an Dan Hadis.” *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 1 (2021): 74–78.
- Fatimah, Desi, Ria Nelly Sari, and M. Rasuli. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2014): 1689–1699.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan IBM SPSS 25*. Ed. 9, Cet. Semarang: UNDIP, 2018.
- Hamidayanti, Luthfina, and Marita Kusuma Wardani. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 2, no. 2 (2018): 96.
- Hia, Iman Jaya, Erlina, and Sirojuzilam. “Analysis of the Effect of the Government Internal Control System (GICS), Implementation of Government Accounting Standards (GAS), Compliance with Legislation and Regional Asset Management on the Quality of West Nias Regency Government Financial Reports.” *International Journal of Research and Review* 7, no. 11 (2020): 31–37.
- Indonesia, Pemerintah Republik. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Indonesia, 2008.

- . *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Indonesia, 2006.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Indonesia, 2004.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Tahun Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, 2004.
- Jensen, Michael C., and William H. Meckling. “Racial Diversity and Its Asymmetry within and across Hierarchical Levels: The Effects on Financial Performance.” *Human Relations* 72, no. 10 (1976): 1671–1696.
- Karmila, Karmila, and Decky Hendarsyah. “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Retribusi Boarding Pass Pelabuhan Terhadap Sistem Pengendalian Internal: Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai.” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 3, no. 2 (2019): 158–173.
<https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/180>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kesuma, Indra, and Irwan Taufiq Ritonga. “Analysis of Relationship between Effectiveness of Internal Control System and Audit Opinions on Local Government Financial Statements.” *The Indonesian Journal of Accounting Research* 23, no. 03 (2020): 467–490.
- Kusumawati, Dwi, and Dwi Ratmono. “Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia.” *Diponegoro Journal of Accounting* 6, no. 1 (2017): 1–15.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18283>.
- Maharani, Destin Alfianika, and Anastasia Anggarkusuma Arofah. “Determinasi Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini Bpk.” *Jurnal Politeknik Caltex Riau* 14, no. 1 (2021): 113–122.
- Oktaria, Dewi, and Yudhi Herliansyah. “Analysis of Weakness of the Internal Control System , Non Compliance with Statutory Provisions and Follow-Up Recommendations Results On the Audit Opinion of Bpk Ri.” *International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)* 8, no. 05 (2019): 51–57.

- Omar, Mariawati. "Issues and Challenges of Shariah Compliance Auditing in Islamic Financial Institution." *Advanced International Journal of Banking, Accounting and Finance* 1, no. 1 (2019): 13–24.
- Pamungkas, Bambang, Reisyah Ibtida, and Cendy Avrian. "Cogent Business & Management Factors Influencing Audit Opinion of the Indonesian Municipal Governments ' Financial Statements Factors Influencing Audit Opinion of the Indonesian Municipal Governments ' Financial Statements." *Cogent Business & Management* 5, no. 1 (2018): 1–18. <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1540256>.
- Petrovits, Christine, Catherine Shakespeare, and Aimee Shih. "The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations." *Accounting Review* 86, no. 1 (2011): 325–357.
- Prasetyaningsih, Erny, Gufratul Yuhalfiyah, and Heri Susanto. "Internal Control System Weakness and Non-Compliance to the Provision of Legislation in Practicing Audit of Local Government in Indonesia." *Open Journal of Political Science* 4 (2014): 257–264.
- Prasetyo, Agus. "Karakteristik Kepala Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Indonesia," 2014.
- Pratiwi, Ristu, and Y Anni Aryani. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Opini." *Jurnal Akuntansi* 20, no. 2 (2016): 167.
- Rosadi, Samsul, Yudi Siyamto, and Helti Nur Aisyiah. "Pengaruh Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, Kelamhan Sistem Pengendalian Internal, Kapatuhan Peraturan Perundang-Undangan, Status Daerah Dan Ukuran Daerah Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Tahun 2013." *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM* 03, no. 02 (2017): 99–111.
- Rumihin, Ridolf, Nicolas Ahuluheluw, and Theophilia F F. Leiwakabessy. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pada Kab/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2016-2018." *Journal of Cleaner Production* 19, no. 11 (2019): 1–13. [http://dx.doi.org/10.1016/S0959-6526\(11\)00143-0](http://dx.doi.org/10.1016/S0959-6526(11)00143-0).
- Safitri, Ni Luh Ketut Shanti Antik, and Darsono. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah." *Diponegoro*

Journal of Accounting 4, no. 1 (2015): 122–133.

Setiyawati, Hari. “Effect of Weaknesses of the Internal Control Systems and Non-Compliance with Statutory Provisions on The Audit Opinion of The Audit Board of The Republic of Indonesia.” *International Journal of Engineering Research and Application* 6, no. 9 (2016): 2248–9622.

Siregar, Muhammad Ichsan, and Jumadi Rudiansyah. “Pengaruh Jumlah Temuan Audit Terhadap Opini Audit Kabupaten/Kota Se-Sumatera.” *Jurnal Ecoment Global* 4, no. 1 (2019): 101.

Siregar, Rosnani. “Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam.” *At-Tijarah* 1, no. 1 (2015): 220–221.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Ke-23. Bandung: Alfabeta, 2016.

Surya, Juanda, and Suparno. “Pengaruh Peran Masyarakat Madani Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 4, no. 2 (2019): 259–269.

Syahputra, T, Amir Hasan, and Rasuli. “Pengaruh Pengungkapan Kinerja Keuangan Pemerintah, Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Opini Audit Dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebagai Variabel Pemoderasi.” *Jurnal Ekonomi* 27, no. 2 (2019): 112–123.

Tafsir Kemenag. “Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 282.” <https://quranhadits.com/>. Last modified 2022. Accessed November 8, 2022. <https://quranhadits.com/quran/2-al-baqarah/al-baqarah-ayat-282/>.

———. “Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 59.” <https://quranhadits.com/>. Last modified 2022. Accessed November 8, 2022. <https://quranhadits.com/quran/4-an-nisa/an-nisa-ayat-59/>.

Tafsir Quraish Shihab. “Al-Qur’an Surat Al-Ma’idah Ayat 2.” <https://quranhadits.com/>. Last modified 2022. Accessed November 8, 2022. <https://quranhadits.com/quran/5-al-ma-idah/al-maidah-ayat-2/>.

———. “Al-Qur’an Surat Al-Mujadalah Ayat 11.” <https://quranhadits.com/>. Last modified 2022. Accessed November 8, 2022. <https://quranhadits.com/quran/58-al-mujadilah/al-mujadilah-ayat-11/>.

mujadalah-ayat-11/.

W, RM Syah Arief Atmaja, and Agung Nur Probohudono. “Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidakpatuhan Dan Kerugian Negara.” *INTEGRITAS Jurnal Anti Korupsi* 1, no. 1 (2015): 81–110.

Widodo, Oka Purnawan, and Sudarno. “Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Dan Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini Bpk Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” *Diponegoro Journal of Accounting* 6, no. 1 (2017): 153–161.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian

NO	Daerah	SPI	KTPP	TKPD	PJLK		OPINI	
1	Kab. Aceh Barat	7	7	0.42	SPG	1	WTP	1
2	Kab. Aceh Barat Daya	9	5	0.44	S1	2	WTP	1
3	Kab. Aceh Besar	10	4	0.40	S1	2	WTP	1
4	Kab. Aceh Jaya	7	11	0.45	S1	2	WTP	1
5	Kab. Aceh Selatan	12	13	0.44	MAN	1	WTP	1
6	Kab. Aceh Singkil	13	20	0.48	SMA	1	WTP	1
7	Kab. Aceh Tamiang	8	12	0.41	S2	3	WTP	1
8	Kab. Aceh Tengah	4	10	0.41	S1	2	WTP	1
9	Kab. Aceh Tenggara	13	19	0.41	S2	3	WTP	1
10	Kab. Aceh Timur	11	13	0.42	DAYAH	1	WTP	1
11	Kab. Bener Meriah	16	10	0.44	MA	1	WTP	1
12	Kab. Bireuen	15	21	0.43	S3	3	WTP	1
13	Kab. Gayo Lues	12	12	0.46	S2	3	WTP	1
14	Kab. Nagan Raya	20	9	0.42	S1	2	WTP	1
15	Kab. Pidie	14	10	0.41	S1	2	WTP	1
16	Kab. Pidie Jaya	15	9	0.43	SMA MILITER	1	WTP	1
17	Kab. Simeuleu	10	11	0.50	S2	3	WTP	1
18	Kota Banda Aceh	13	6	0.43	S2	3	WTP	1
19	Kota Langsa	6	17	0.48	S1	2	WTP	1
20	Kota Lhokseumawe	19	9	0.51	SMA	1	WTP	1
21	Kota Sabang	11	13	0.51	S1	2	WTP	1
22	Kota Subulussalam	8	15	0.53	S1	2	WTP	1
23	Kab. Asahan	2	11	0.51	S1	2	WTP	1
24	Kab. Batubara	-	7	0.48	S2	3	WTP	1
25	Kab. Dairi	2	7	0.54	S3	3	WTP	1
26	Kab. Deli Serdang	6	16	0.41	S1	2	WTP	1
27	Kab. Karo	4	15	0.54	SMA	1	WTP	1
28	Kab. Labuhan Batu	15	13	0.54	S2	3	WDP	0
29	Kab. Labuhan Batu Utara	4	14	0.58	S2	3	WTP	1
30	Kab. Langkat	1	15	0.52	S1	2	WTP	1
31	Kab. Mandailing Natal	4	14	0.50	S1	2	WDP	0
32	Kab. Nias	9	14	0.47	S2	3	WDP	0
33	Kab. Nias Barat	7	12	0.51	SMA	1	WDP	0
34	Kab. Nias Selatan	15	14	0.43	S3	3	WDP	0
35	Kab. Nias Utara	10	13	0.51	S1	2	WDP	0
36	Kab. Padang Lawas	4	8	0.48	S2	3	WTP	1
37	Kab. Padang Lawas Utara	2	11	0.46	S2	3	WDP	0
38	Kab. Pakpak Bharat	5	6	0.66	SMU	1	WTP	1

39	Kab. Serdang Bedagai	5	9	0.49	SMA	1	WTP	1
40	Kab. Simalungun	6	9	0.52	S1	2	WDP	0
41	Kab. Tapanuli Selatan	2	6	0.46	S2	3	WTP	1
42	Kab. Tapanuli Utara	2	11	0.47	S2	3	WTP	1
43	Kab. Toba	6	16	0.52	S2	3	WTP	1
44	Kota Binjai	4	11	0.61	S2	3	WTP	1
45	Kota Gunungsitoli	3	6	0.58	S1	2	WTP	1
46	Kota Medan	13	13	0.36	S2	3	WTP	1
47	Kota Padangsidimpuan	5	11	0.62	S1	2	WTP	1
48	Kota Pematangsiantar	5	13	0.64	S2	3	WDP	0
49	Kota Sibolga	9	14	0.63	SMU	1	WTP	1
50	Kota Tanjung Balai	10	7	0.67	S2	3	WDP	0
51	Kota Tebing Tinggi	8	18	0.60	S2	3	WTP	1
52	Kab. Agam	9	11	0.55	S3	3	WTP	1
53	Kab. Dharmasraya	11	9	0.79	S1	2	WTP	1
54	Kab. Kepulauan Mentawai	9	9	0.67	S2	3	WDP	0
55	Kab. Lima Puluh Kota	8	14	0.58	S1	2	WTP	1
56	Kab. Padang Pariaman	11	15	0.55	S2	3	WTP	1
57	Kab. Pasaman	5	14	0.54	S2	3	WTP	1
58	Kab. Pasaman Barat	5	10	0.54	S1	2	WTP	1
59	Kab. Pesisir Selatan	16	12	0.49	S2	3	WTP	1
60	Kab. Sijunjung	3	17	0.54	S2	3	WTP	1
61	Kab. Solok	14	23	0.58	S2	3	WTP	1
62	Kab. Solok Selatan	9	9	0.51	S2	3	WTP	1
63	Kab. Tanah Datar	3	9	0.54	S1	2	WTP	1
64	Kota Bukit Tinggi	1	9	0.62	S1	2	WTP	1
65	Kota Padang	10	12	0.49	S2	3	WTP	1
66	Kota Padang Panjang	13	8	0.64	S1	2	WTP	1
67	Kota Pariaman	16	11	0.62	S3	3	WTP	1
68	Kota Payakumbuh	3	10	0.59	S2	3	WTP	1
69	Kota Sawahlunto	16	5	0.60	S1	2	WTP	1
70	Kota Solok	19	13	0.69	S2	3	WTP	1
71	Kab. Bengkulu	8	18	0.12	S2	3	WTP	1
72	Kab. Indragiri Hilir	12	31	0.45	S2	3	WTP	1
73	Kab. Indragiri Hulu	23	29	0.43	S2	3	WTP	1
74	Kab. Kampar	14	25	0.32	S1	2	WTP	1
75	Kab. Kepulauan Meranti	9	2	0.37	S1	2	WTP	1
76	Kab. Kuantan Singingi	11	16	0.42	S2	3	WTP	1
77	Kab. Pelalawan	8	15	0.41	SMU	1	WTP	1
78	Kab. Rokan Hilir	9	13	0.25	APDN	1	WTP	1
79	Kab. Rokan Hulu	8	6	0.43	S2	3	WTP	1
80	Kab. Siak	10	16	0.19	S2	3	WTP	1

81	Kota Dumai	3	11	0.29	S2	3	WTP	1
82	Kota Pekanbaru	14	23	0.35	S3	3	WTP	1
83	Kab. Batang Hari	17	24	0.48	S1	2	WTP	1
84	Kab. Bungo	5	14	0.47	S2	3	WDP	0
85	Kab. Kerinci	15	20	0.47	S3	3	WTP	1
86	Kab. Merangin	4	12	0.49	S3	3	WTP	1
87	Kab. Muaro Jambi	-	7	0.48	S2	3	WTP	1
88	Kab. Sarolangun	3	9	0.46	S1	2	WTP	1
89	Kab. Tanjung Jabung Barat	18	16	0.34	S2	3	WTP	1
90	Kab. Tanjung Jabung Timur	4	13	0.54	S1	2	WTP	1
91	Kab. Tebo	8	4	0.49	S3	3	WTP	1
92	Kota Jambi	14	13	0.42	S3	3	WTP	1
93	Kota Sungai Penuh	6	14	0.55	S3	3	WTP	1
94	Kab. Banyuasin	4	17	0.40	S2	3	WTP	1
95	Kab. Empat Lawang	10	18	0.38	S2	3	WTP	1
96	Kab. Lahat	10	9	0.33	S1	2	WTP	1
97	Kab. Muara Enim	11	13	0.25	S2	3	WTP	1
98	Kab. Musi Banyuasin	11	7	0.11	S3	3	WTP	1
99	Kab. Musi Rawas	6	10	0.33	S2	3	WTP	1
100	Kab. Musi Rawas Utara	2	15	0.41	S1	2	WTP	1
101	Kab. Ogan Ilir	16	18	0.39	S1	2	WTP	1
102	Kab. Ogan Komering Ilir	3	8	0.43	S1	2	WTP	1
103	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	3	13	0.43	S1	2	WTP	1
104	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	4	15	0.38	S1	2	WTP	1
105	Kota Lubuk Linggau	4	9	0.44	S2	3	WTP	1
106	Kota Pagar Alam	4	11	0.43	S1	2	WTP	1
107	Kota Palembang	15	23	0.33	S1	2	WTP	1
108	Kota Prabumulih	9	10	0.41	S2	3	WTP	1
109	Kab. Bengkulu Selatan	12	20	0.52	S2	3	WDP	0
110	Kab. Bengkulu Tengah	9	10	0.53	S3	3	WTP	1
111	Kab. Bengkulu Utara	16	21	0.49	S1	2	WTP	1
112	Kab. Kaur	14	17	0.53	S2	3	WTP	1
113	Kab. Kepahiang	13	11	0.55	S3	3	WTP	1
114	Kab. Lebong	13	13	0.57	SMA	1	WTP	1
115	Kab. Mukomuko	20	16	0.52	S2	3	WTP	1
116	Kab. Rejang Lebong	18	19	0.56	S2	3	WTP	1
117	Kab. Seluma	6	8	0.53	S1	2	WTP	1
118	Kota Bengkulu	12	16	0.60	S1	2	WTP	1

119	Kab. Lampung Barat	1	7	0.49	S1	2	WTP	1
120	Kab. Lampung Selatan	4	7	0.46	SMA	1	WTP	1
121	Kab. Lampung Tengah	5	20	0.51	S1	2	WTP	1
122	Kab. Lampung Timur	11	17	0.49	S2	3	WTP	1
123	Kab. Lampung Utara	21	19	0.53	S2	3	WDP	0
124	Kab. Pesawaran	6	11	0.49	S2	3	WTP	1
125	Kab. Pesisir Barat	7	10	0.50	S3	3	WTP	1
126	Kab. Tanggamus	9	11	0.44	S2	3	WTP	1
127	Kab. Tulang Bawang	3	9	0.50	S3	3	WTP	1
128	Kab. Way Kanan	3	15	0.48	S2	3	WTP	1
129	Kota Bandar Lampung	8	10	0.47	S2	3	WDP	0
130	Kota Metro	5	12	0.47	S1	2	WTP	1
131	Kab. Bangka	8	8	0.44	S2	3	WTP	1
132	Kab. Bangka Barat	6	8	0.51	S1	2	WTP	1
133	Kab. Bangka Selatan	7	15	0.59	S2	3	WTP	1
134	Kab. Bangka Tengah	4	3	0.47	S1	2	WTP	1
135	Kab. Belitung	11	8	0.48	S1	2	WTP	1
136	Kab. Belitung Timur	11	5	0.54	S1	2	WTP	1
137	Kota Pangkalpinang	19	16	0.51	S2	3	WTP	1
138	Kab. Bintan	6	11	0.40	S1	2	WTP	1
139	Kab. Karimun	28	7	0.34	S3	3	WTP	1
140	Kab. Kepulauan Anambas	3	6	0.46	S1	2	WTP	1
141	Kab. Lingga	7	12	0.48	S1	2	WTP	1
142	Kab. Natuna	10	11	0.43	S2	3	WTP	1
143	Kota Batam	7	16	0.24	S2	3	WTP	1
144	Kota Tanjungpinang	10	5	0.45	S1	2	WTP	1
145	Kab. Bandung	13	12	0.37	S2	3	WTP	1
146	Kab. Bandung Barat	14	18	0.40	SMU	1	WDP	0
147	Kab. Bekasi	3	16	0.20	S1	2	WTP	1
148	Kab. Bogor	7	15	0.24	S2	3	WTP	1
149	Kab. Ciamis	15	8	0.42	S3	3	WTP	1
150	Kab. Cianjur	20	14	0.38	S2	3	WTP	1
151	Kab. Cirebon	11	14	0.38	S2	3	WTP	1
152	Kab. Garut	19	18	0.37	S2	3	WTP	1
153	Kab. Indramayu	11	21	0.39	S2	3	WDP	0
154	Kab. Karawang	13	12	0.28	S1	2	WTP	1
155	Kab. Kuningan	15	11	0.40	S2	3	WTP	1
156	Kab. Majalengka	19	13	0.35	S3	3	WTP	1
157	Kab. Pangandaran	15	11	0.32	SMA	1	WTP	1
158	Kab. Purwakarta	13	20	0.37	S1	2	WTP	1
159	Kab. Subang	11	14	0.40	S2	3	WTP	1
160	Kab. Sukabumi	12	19	0.38	S2	3	WTP	1

161	Kab. Sumedang	12	12	0.37	S3	3	WTP	1
162	Kota Bandung	22	13	0.28	S1	2	WTP	1
163	Kota Bekasi	9	6	0.23	S3	3	WTP	1
164	Kota Bogor	10	20	0.31	S3	3	WTP	1
165	Kota Cirebon	8	15	0.33	S1	2	WTP	1
166	Kota Depok	6	12	0.28	S3	3	WTP	1
167	Kota Sukabumi	9	12	0.40	S2	3	WTP	1
168	Kota Tasikmalaya	7	6	0.43	S1	2	WTP	1
169	Kab. Banjarnegara	3	4	0.45	PAKET C	1	WTP	1
170	Kab. Banyumas	14	3	0.39	S1	2	WTP	1
171	Kab. Batang	10	8	0.43	S3	3	WTP	1
172	Kab. Blora	9	9	0.27	S2	3	WTP	1
173	Kab. Boyolali	4	7	0.40	S1	2	WTP	1
174	Kab. Brebes	10	6	0.41	S2	3	WTP	1
175	Kab. Cilacap	14	9	0.41	STM	1	WTP	1
176	Kab. Demak	2	3	0.37	D2	1	WTP	1
177	Kab. Grobogan	7	5	0.41	S2	3	WTP	1
178	Kab. Jepara	6	7	0.40	S1	2	WTP	1
179	Kab. Karanganyar	6	7	0.43	S2	3	WTP	1
180	Kab. Kebumen	9	6	0.43	S1	2	WTP	1
181	Kab. Kendal	7	8	0.43	S1	2	WTP	1
182	Kab. Klaten	9	6	0.45	S1	2	WTP	1
183	Kab. Kudus	15	8	0.38	S3	3	WTP	1
184	Kab. Magelang	10	6	0.41	S1	2	WTP	1
185	Kab. Pati	15	14	0.42	S2	3	WTP	1
186	Kab. Pekalongan	6	4	0.43	S2	3	WTP	1
187	Kab. Pemalang	5	8	0.46	S2	3	WTP	1
188	Kab. Purbalingga	8	11	0.43	S2	3	WTP	1
189	Kab. Purworejo	5	6	0.43	S2	3	WTP	1
190	Kab. Rembang	4	8	0.39	S1	2	WTP	1
191	Kab. Semarang	7	5	0.41	S2	3	WTP	1
192	Kab. Sragen	3	6	0.45	S1	2	WTP	1
193	Kab. Sukoharjo	8	5	0.42	S2	3	WTP	1
194	Kab. Tegal	5	5	0.41	S1	2	WTP	1
195	Kab. Temanggung	11	5	0.42	S1	2	WTP	1
196	Kab. Wonogiri	5	3	0.47	SMA	1	WTP	1
197	Kab. Wonosobo	5	7	0.43	S1	2	WTP	1
198	Kota Magelang	11	8	0.44	S1	2	WTP	1
199	Kota Pekalongan	4	2	0.45	S1	2	WTP	1
200	Kota Salatiga	12	11	0.48	S2	3	WTP	1
201	Kota Semarang	26	11	0.27	S2	3	WTP	1
202	Kota Surakarta	5	3	0.43	S2	3	WTP	1
203	Kota Tegal	6	1	0.45	S2	3	WTP	1

204	Kab. Gunungkidul	7	5	0.49	S1	2	WTP	1
205	Kab. Kulon Progo	8	5	0.42	S1	2	WTP	1
206	Kab. Sleman	6	3	0.37	D3	1	WTP	1
207	Kota Yogyakarta	4	2	0.37	S1	2	WTP	1
208	Kab. Bangkalan	7	12	0.44	PAKET C	1	WTP	1
209	Kab. Banyuwangi	19	8	0.45	S1	2	WTP	1
210	Kab. Blitar	9	5	0.47	D3	1	WTP	1
211	Kab. Bojonegoro	11	12	0.26	S3	3	WTP	1
212	Kab. Bondowoso	7	16	0.44	S1	2	WTP	1
213	Kab. Gresik	10	12	0.30	S1	2	WTP	1
214	Kab. Jember	20	9	0.46	S1	2	TW	0
215	Kab. Jombang	9	4	0.40	PONPES	1	WTP	1
216	Kab. Kediri	10	4	0.41	S1	2	WTP	1
217	Kab. Lamongan	13	14	0.39	S3	3	WTP	1
218	Kab. Lumajang	14	11	0.43	S2	3	WTP	1
219	Kab. Madiun	10	4	0.44	S1	2	WTP	1
220	Kab. Magetan	11	13	0.47	S3	3	WTP	1
221	Kab. Malang	11	14	0.41	S2	3	WTP	1
222	Kab. Mojokerto	4	12	0.38	S2	3	WTP	1
223	Kab. Nganjuk	8	7	0.47	S3	3	WTP	1
224	Kab. Ngawi	10	5	0.46	S2	3	WTP	1
225	Kab. Pacitan	10	6	0.46	S1	2	WTP	1
226	Kab. Pamekasan	16	20	0.44	S1	2	WTP	1
227	Kab. Pasuruan	6	15	0.34	S2	3	WTP	1
228	Kab. Ponorogo	13	7	0.44	S2	3	WTP	1
229	Kab. Probolinggo	11	11	0.40	S1	2	WTP	1
230	Kab. Sampang	23	13	0.45	S1	2	WTP	1
231	Kab. Sidoarjo	8	8	0.26	S1	2	WTP	1
232	Kab. Situbondo	16	14	0.43	S2	3	WTP	1
233	Kab. Sumenep	6	9	0.47	S2	3	WTP	1
234	Kab. Trenggalek	8	8	0.46	S1	2	WTP	1
235	Kab. Tulungagung	5	11	0.42	S2	3	WTP	1
236	Kota Batu	18	20	0.51	S2	3	WTP	1
237	Kota Blitar	4	5	0.46	S2	3	WTP	1
238	Kota Kediri	7	4	0.45	S1	2	WTP	1
239	Kota Madiun	7	5	0.45	S2	3	WTP	1
240	Kota Malang	8	11	0.39	S1	2	WTP	1
241	Kota Mojokerto	12	11	0.42	S1	2	WTP	1
242	Kota Pasuruan	15	13	0.50	S1	2	WTP	1
243	Kota Probolinggo	22	12	0.48	S2	3	WTP	1
244	Kota Surabaya	14	1	0.16	S2	3	WTP	1
245	Kab. Lebak	4	5	0.40	S2	3	WTP	1
246	Kab. Pandeglang	5	8	0.45	S2	3	WTP	1

247	Kab. Serang	2	6	0.36	S2	3	WTP	1
248	Kab. Tangerang	6	6	0.21	S2	3	WTP	1
249	Kota Cilegon	1	8	0.34	S2	3	WTP	1
250	Kota Serang	4	9	0.48	S2	3	WTP	1
251	Kota Tangerang	5	6	0.23	S2	3	WTP	1
252	Kota Tangerang Selatan	2	9	0.19	S1	2	WTP	1
253	Kab. Badung	7	3	0.08	S1	2	WTP	1
254	Kab. Bangli	11	1	0.53	S1	2	WTP	1
255	Kab. Buleleng	4	2	0.45	S1	2	WTP	1
256	Kab. Gianyar	13	9	0.34	S2	3	WTP	1
257	Kab. Jembrana	6	2	0.48	S1	2	WTP	1
258	Kab. Karangasem	8	1	0.48	S2	3	WTP	1
259	Kab. Klungkung	2	6	0.46	S2	3	WTP	1
260	Kab. Tabanan	6	4	0.42	S3	3	WTP	1
261	Kota Denpasar	5	2	0.32	S1	2	WTP	1
262	Kab. Bima	6	11	0.48	S1	2	WTP	1
263	Kab. Dompu	14	18	0.53	SMA	1	WTP	1
264	Kab. Lombok Barat	4	16	0.43	S1	2	WTP	1
265	Kab. Lombok Tengah	4	14	0.45	S1	2	WTP	1
266	Kab. Lombok Timur	10	16	0.43	S2	3	WTP	1
267	Kab. Lombok Utara	7	10	0.52	S1	2	WTP	1
268	Kab. Sumbawa	7	16	0.48	S1	2	WTP	1
269	Kab. Sumbawa Barat	13	20	0.39	S3	3	WTP	1
270	Kota Bima	9	11	0.61	S1	2	WTP	1
271	Kota Mataram	9	15	0.41	S2	3	WTP	1
272	Kab. Alor	7	10	0.53	S1	2	WTP	1
273	Kab. Belu	4	6	0.51	S1	2	WTP	1
274	Kab. Ende	15	7	0.50	S2	3	WTP	1
275	Kab. Flores Timur	11	3	0.54	S1	2	WDP	0
276	Kab. Kupang	4	9	0.54	S2	3	WDP	0
277	Kab. Lembata	5	3	0.53	S2	3	WTP	1
278	Kab. Malaka	4	6	0.56	S3	3	WTP	1
279	Kab. Manggarai	11	10	0.48	S2	3	WTP	1
280	Kab. Manggarai Barat	5	6	0.45	S1	2	WTP	1
281	Kab. Manggarai Timur	6	3	0.47	S2	3	WTP	1
282	Kab. Nagekeo	9	10	0.53	S2	3	WTP	1
283	Kab. Ngada	5	9	0.56	S2	3	WTP	1
284	Kab. Rote Ndao	3	11	0.56	S1	2	WTP	1
285	Kab. Sabu Raijua	3	8	0.54	S2	3	WTP	1
286	Kab. Sikka	9	5	0.53	S2	3	WTP	1
287	Kab. Sumba Barat	11	8	0.52	S1	2	WDP	0
288	Kab. Sumba Barat Daya	7	10	0.45	S1	2	WDP	0

289	Kab. Sumba Tengah	6	5	0.58	S1	2	WTP	1
290	Kab. Sumba Timur	6	11	0.53	S2	3	WTP	1
291	Kab. Timor Tengah Selatan	9	9	0.49	S2	3	WTP	1
292	Kab. Timor Tengah Utara	8	9	0.55	S1	2	WTP	1
293	Kota Kupang	6	6	0.55	S3	3	WTP	1
294	Kab. Bengkayang	12	13	0.54	S2	3	WDP	0
295	Kab. Kapuas Hulu	6	18	0.54	S1	2	WTP	1
296	Kab. Kayong Utara	4	12	0.61	S1	2	WDP	0
297	Kab. Ketapang	8	11	0.46	S2	3	WTP	1
298	Kab. Kubu Raya	4	9	0.49	S1	2	WTP	1
299	Kab. Landak	3	10	0.44	S1	2	WTP	1
300	Kab. Melawi	9	8	0.56	D3	1	WTP	1
301	Kab. Mempawah	4	4	0.55	S2	3	WTP	1
302	Kab. Sambas	10	10	0.49	S2	3	WTP	1
303	Kab. Sanggau	5	9	0.49	S2	3	WTP	1
304	Kab. Sekadau	4	5	0.63	S1	2	WTP	1
305	Kab. Sintang	7	12	0.45	S2	3	WTP	1
306	Kota Pontianak	6	12	0.43	S2	3	WTP	1
307	Kota Singkawang	7	8	0.56	S2	3	WTP	1
308	Kab. Barito Selatan	8	9	0.53	S1	2	WTP	1
309	Kab. Barito Timur	10	16	0.51	S2	3	WTP	1
310	Kab. Gunung Mas	2	10	0.52	S2	3	WTP	1
311	Kab. Kapuas	11	15	0.45	S2	3	WTP	1
312	Kab. Katingan	16	11	0.55	S1	2	WTP	1
313	Kab. Kotawaringin Barat	12	13	0.42	S2	3	WTP	1
314	Kab. Kotawaringin Timur	11	2	0.48	S2	3	WTP	1
315	Kab. Murung Raya	4	10	0.52	S2	3	WTP	1
316	Kab. Pulang Pisau	10	4	0.56	S2	3	WTP	1
317	Kota Palangka Raya	6	6	0.53	S1	2	WTP	1
318	Kab. Balangan	17	19	0.30	S2	3	WTP	1
319	Kab. Banjar	14	14	0.39	S1	2	WTP	1
320	Kab. Barito Kuala	17	10	0.49	S1	2	WTP	1
321	Kab. Hulu Sungai Selatan	4	3	0.36	S2	3	WTP	1
322	Kab. Hulu Sungai Tengah	34	11	0.41	S2	3	WDP	0
323	Kab. Hulu Sungai Utara	12	18	0.37	S2	3	WTP	1
324	Kab. Kotabaru	22	20	0.40	S1	2	WTP	1
325	Kab. Tabalong	24	18	0.30	S2	3	WTP	1
326	Kab. Tanah Bumbu	9	18	0.27	S2	3	WTP	1

327	Kab. Tanah Laut	34	11	0.31	S2	3	WTP	1
328	Kab. Tapin	14	13	0.36	S2	3	WTP	1
329	Kota Banjarbaru	9	10	0.40	S2	3	WTP	1
330	Kota Banjarmasin	13	17	0.35	S2	3	WTP	1
331	Kab. Berau	12	24	0.24	S2	3	WTP	1
332	Kab. Kutai Barat	9	35	0.25	S1	2	WTP	1
333	Kab. Kutai Kartanegara	5	12	0.10	S2	3	WTP	1
334	Kab. Kutai Timur	24	20	0.16	S2	3	WDP	0
335	Kab. Mahakam Ulu	11	13	0.37	S1	2	WTP	1
336	Kab. Paser	11	4	0.16	S1	2	WTP	1
337	Kab. Penajam Paser Utara	8	11	0.21	S2	3	WTP	1
338	Kota Balikpapan	8	17	0.17	S1	2	WTP	1
339	Kota Bontang	6	18	0.15	S1	2	WTP	1
340	Kota Samarinda	15	27	0.23	S3	3	WTP	1
341	Kab. Bulungan	12	13	0.43	S2	3	WTP	1
342	Kab. Malinau	10	8	0.54	S1	2	WTP	1
343	Kab. Nunukan	9	7	0.37	S3	3	WTP	1
344	Kab. Tana Tidung	10	14	0.56	D3	1	WTP	1
345	Kota Tarakan	7	9	0.46	S2	3	WTP	1
346	Kab. Bolaang Mongondow	16	19	0.52	S1	2	WTP	1
347	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	11	22	0.55	S1	2	WTP	1
348	Kab. Bolaang Mongondow Timur	6	11	0.56	S1	2	WTP	1
349	Kab. Bolaang Mongondow Utara	12	14	0.54	S1	2	WTP	1
350	Kab. Kepulauan Sangihe	6	11	0.52	S2	3	WTP	1
351	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	5	13	0.58	S1	2	WTP	1
352	Kab. Kepulauan Talaud	2	9	0.58	S3	3	WTP	1
353	Kab. Minahasa	10	19	0.51	S2	3	WTP	1
354	Kab. Minahasa Selatan	6	12	0.56	S1	2	WTP	1
355	Kab. Minahasa Tenggara	3	10	0.57	S1	2	WTP	1
356	Kab. Minahasa Utara	1	22	0.51	S1	2	TW	0
357	Kota Bitung	9	18	0.63	S2	3	WTP	1
358	Kota Kotamobagu	10	11	0.56	S1	2	WTP	1
359	Kota Manado	1	7	0.53	S3	3	WTP	1
360	Kota Tomohon	3	7	0.60	S1	2	WTP	1
361	Kab. Banggai	13	10	0.42	S3	3	WTP	1

362	Kab. Banggai Kepulauan	48	19	0.54	SMA	1	TMP	0
363	Kab. Banggai Laut	14	14	0.59	S1	2	WTP	1
364	Kab. Donggala	15	19	0.49	S3	3	WTP	1
365	Kab. Morowali	16	15	0.36	S1	2	WTP	1
366	Kab. Morowali Utara	8	10	0.52	S3	3	WTP	1
367	Kab. Parigi Moutong	3	4	0.43	SMA	1	WTP	1
368	Kab. Poso	9	13	0.49	S1	2	WTP	1
369	Kab. Sigi	19	21	0.51	S2	3	WTP	1
370	Kab. Tojo Una-Una	14	17	0.50	S2	3	WTP	1
371	Kota Palu	10	11	0.42	S1	2	WTP	1
372	Kab. Bantaeng	10	22	0.51	S3	3	WTP	1
373	Kab. Barru	8	7	0.54	S2	3	WTP	1
374	Kab. Bone	8	9	0.42	S3	3	WTP	1
375	Kab. Bulukumba	10	14	0.45	SMA	1	WDP	0
376	Kab. Enrekang	17	25	0.46	S2	3	WTP	1
377	Kab. Gowa	11	21	0.43	S2	3	WDP	0
378	Kab. Jeneponto	26	18	0.49	S2	3	WDP	0
379	Kab. Kepulauan Selayar	21	21	0.57	SLTA	1	WTP	1
380	Kab. Luwu	21	12	0.48	S2	3	WTP	1
381	Kab. Luwu Timur	12	8	0.34	S2	3	WTP	1
382	Kab. Luwu Utara	8	13	0.46	S2	3	WTP	1
383	Kab. Maros	10	4	0.48	S2	3	WTP	1
384	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	9	10	0.53	S2	3	WTP	1
385	Kab. Pinrang	8	5	0.49	S1	2	WTP	1
386	Kab. Sinjai	10	6	0.49	S2	3	WTP	1
387	Kab. Soppeng	8	11	0.49	S1	2	WTP	1
388	Kab. Takalar	14	17	0.54	S2	3	WDP	0
389	Kab. Tana Toraja	11	17	0.48	S1	2	WDP	0
390	Kab. Toraja utara	16	11	0.49	S2	3	WTP	1
391	Kab. Wajo	23	13	0.47	S3	3	WTP	1
392	Kota Makassar	12	17	0.38	S1	2	WDP	0
393	Kota Palopo	8	12	0.51	S2	3	WTP	1
394	Kota Pare pare	12	11	0.52	S3	3	WTP	1
395	Kab. Bombana	12	11	0.45	S2	3	WTP	1
396	Kab. Buton	6	16	0.50	S2	3	WTP	1
397	Kab. Buton Utara	10	18	0.62	S2	3	WTP	1
398	Kab. Kolaka	17	14	0.45	S2	3	WTP	1
399	Kab. Kolaka Timur	10	18	0.53	S1	2	WTP	1
400	Kab. Kolaka Utara	16	10	0.53	S2	3	WTP	1
401	Kab. Konawe Kepulauan	9	21	0.60	S2	3	WTP	1

402	Kab. Konawe Selatan	19	15	0.47	S2	3	WDP	0
403	Kab. Konawe Utara	4	16	0.49	S3	3	WTP	1
404	Kab. Muna	12	19	0.50	S1	2	WTP	1
405	Kab. Wakatobi	12	8	0.53	S2	3	WTP	1
406	Kota Bau bau	11	18	0.59	S3	3	WTP	1
407	Kota Kendari	12	10	0.51	S2	3	WTP	1
408	Kab. Boalemo	17	19	0.53	S2	3	WTP	1
409	Kab. Bone Bolango	8	13	0.48	S3	3	WTP	1
410	Kab. Gorontalo	5	7	0.44	S3	3	WTP	1
411	Kab. Gorontalo Utara	17	17	0.49	S3	3	WTP	1
412	Kota Gorontalo	14	11	0.53	S3	3	WTP	1
413	Kab. Majene	6	9	0.53	S2	3	WTP	1
414	Kab. Mamasa	9	20	0.53	S2	3	WTP	1
415	Kab. Mamuju	6	9	0.58	S2	3	WTP	1
416	Kab. Mamuju Tengah	8	10	0.52	PAKET C	1	WTP	1
417	Kab. Pasangkayu	5	13	0.53	S1	2	WTP	1
418	Kab. Buru	8	14	0.52	S2	3	WTP	1
419	Kab. Buru Selatan	15	15	0.62	S3	3	WDP	0
420	Kab. Kepulauan Aru	27	17	0.67	S1	2	WDP	0
421	Kab. Kepulauan Tanimbar	13	12	0.59	S2	3	WDP	0
422	Kab. Maluku Barat Daya	13	17	0.61	S1	2	WTP	1
423	Kab. Maluku Tengah	11	19	0.55	S1	2	WTP	1
424	Kab. Seram Bagian Barat	20	16	0.59	S2	3	WDP	0
425	Kota Ambon	22	15	0.55	S1	2	WDP	0
426	Kota Tual	16	17	0.65	S2	3	WTP	1
427	Kab. Halmahera Barat	7	14	0.51	S2	3	WTP	1
428	Kab. Halmahera Selatan	2	9	0.47	S2	3	WTP	1
429	Kab. Halmahera Timur	5	7	0.51	S2	3	WTP	1
430	Kab. Halmahera Utara	5	11	0.46	S2	3	WTP	1
431	Kab. Kepulauan Sula	10	9	0.62	S1	2	WTP	1
432	Kab. Pulau Morotai	13	13	0.49	S1	2	WTP	1
433	Kab. Pulau Taliabu	9	15	0.55	S1	2	TMP	0
434	Kota Ternate	12	14	0.63	S3	3	WTP	1
435	Kota Tidore Kepulauan	8	9	0.57	S2	3	WTP	1
436	Kab. Asmat	1	8	0.58	S1	2	WTP	1
437	Kab. Biak Numfor	3	6	0.45	S1	2	WTP	1
438	Kab. Boven Digoel	4	9	0.62	S1	2	WDP	0
439	Kab. Deiyai	8	8	0.55	S2	3	WDP	0
440	Kab. Dogiyai	3	7	0.51	S1	2	WDP	0
441	Kab. Intan Jaya	3	10	0.66	S2	3	WDP	0

442	Kab. Jayapura	8	6	0.44	S2	3	WTP	1
443	Kab. Jayawijaya	2	4	0.50	S2	3	WTP	1
444	Kab. Keerom	3	4	0.61	S2	3	WTP	1
445	Kab. Kepulauan Yapen	6	6	0.53	S1	2	WTP	1
446	Kab. Lanny Jaya	4	5	0.50	S2	3	WTP	1
447	Kab. Mamberamo Raya	16	21	0.66	S2	3	TMP	0
448	Kab. Mamberamo Tengah	3	11	0.63	S2	3	WDP	0
449	Kab. Merauke	4	6	0.60	S2	3	WTP	1
450	Kab. Mimika	5	9	0.24	S2	3	WTP	1
451	Kab. Nabire	3	5	0.58	S1	2	WTP	1
452	Kab. Nduga	5	8	0.55	D3	1	WDP	0
453	Kab. Pegunungan Bintang	7	12	0.65	S2	3	TMP	0
454	Kab. Puncak	8	8	0.62	S2	3	WTP	1
455	Kab. Puncak Jaya	11	19	0.57	S3	3	WTP	1
456	Kab. Sarmi	11	14	0.62	S2	3	WDP	0
457	Kab. Supiori	2	8	0.65	S1	2	WTP	1
458	Kab. Tolikara	7	8	0.47	S2	3	WDP	0
459	Kab. Yahukimo	2	6	0.49	S1	2	WTP	1
460	Kab. Yalimo	2	7	0.50	S1	2	WTP	1
461	Kota Jayapura	2	2	0.46	S3	3	WTP	1
462	Kab. Manokwari	32	20	0.38	S2	3	WTP	1
463	Kab. Maybrat	11	11	0.36	S3	3	WTP	1
464	Kab. Pegunungan Arfak	14	8	0.43	S2	3	WTP	1
465	Kab. Raja Ampat	5	10	0.53	S1	2	WTP	1
466	Kab. Sorong	5	5	0.30	S3	3	WTP	1
467	Kab. Sorong Selatan	10	13	0.43	S2	3	WTP	1
468	Kab. Tambrau	13	11	0.50	S2	3	WTP	1
469	Kab. Teluk Bintuni	11	8	0.19	S2	3	WTP	1
470	Kab. Teluk Wondama	8	14	0.43	S2	3	WTP	1
471	Kota Sorong	11	9	0.42	S2	3	WTP	1
472	Kab. Waropen	14	16	0.61	S1	2	TMP	0

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Moh Faris Nur Wahib
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 21 Juli 2001
NIM : 1905046097
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Beringin Asri Timur No. 914 Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang
Nomor Telepon : 0877 7345 9531
Email : nurfaris770@gmail.com

Jenjang Pendidikan

SD/MI 2007-2013 : MI Miftahul Akhlaqiyah Semarang
SMP 2013-2016 : SMP Islam Nurussunnah Semarang
SMA 2016-2019 : SMA TRENSAINS Muhammadiyah Sragen

Semarang, 5 Desember 2022

Moh Faris Nur Wahib
NIM. 1905046097